

LAPORAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

Triwulan III

KATA PENGANTAR




Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III tahun 2025 ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 94,23 (Kategori Baik).

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah ditetapkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 28 Oktober 2025


Tornanda Syaifullah

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Tornanda Syafullah

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Muqaromah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berdasarkan PK tersebut, terdapat lima indikator kinerja yang terdiri dari dua Indikator yang periode pelaporannya bersifat triwulanan, satu bersifat semesteran, dan dua bersifat tahunan.

Sebanyak lima indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP periode triwulan III Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 94,23% (Kategori Baik).

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Program Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dengan Indikator Kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar), Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar), Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun), Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)
2. Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP dengan Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDPSKP (Nilai)
3. Tiga indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat triwulanan yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut, Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya, dan Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas; dan dua indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat tahunan yaitu Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri, dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.
4. Indikator kinerja yang belum mencapai target pada triwulan III tahun 2025 yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut dengan capaian sebesar 0,24 USD Miliar (nilai prognosa sampai dengan September) atau setara dengan 58,54% dari target triwulan III sebesar 0,41 USD Miliar.

5. Indikator kinerja yang memiliki capaian melebihi target pada triwulan III Tahun 2025 adalah Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya dengan capaian sebesar 4,25 (prognosa sampai dengan September) atau setara dengan 104,17% dari target triwulan III sebesar 4,08 USD Miliar; dan Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas dengan capaian 1,80% atau setara 120% dari target triwulan III sebesar 1,50%.
6. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp255.259.620.000,- yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNBPN. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp96.829.956.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp158.429.664.000,- Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan periode triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp84.206.356.000,- atau setara dengan 32,99% terhadap total pagu anggaran awal atau 52,15% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Tugas dan Fungsi.....	2
4. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur.....	6
5. Permasalahan Utama	6
6. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
1. Rancangan Rencana Strategis.....	15
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
1. Capaian Kinerja.....	20
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	21
A. Nilai Ekspor Rumput Laut.....	21
C. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri	53
D. Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas.....	81
E. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP	86
3. Realisasi Anggaran	103
BAB IV PENUTUP	105
1. Kesimpulan	105
2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	105
3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ..	106
LAMPIRAN	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025.....	19
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2025	21
Tabel 3.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut	22
Tabel 4.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya	33
Tabel 5.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri.....	53
Tabel 6.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	86
Tabel 7.	Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2024 (Dalam Rp.000)	104
Tabel 8.	Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024 (Dalam Rp.000)	104
Tabel 9.	Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan III Tahun 2025	105
Tabel 10.	Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2.	Struktur Organisasi BBP3KP	5
Gambar 3.	Sistematika Penyajian	6
Gambar 4.	Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2025	6
Gambar 5.	Sistematika Peyajian	14
Gambar 6.	Capaian NKO pada Triwulan III tahun 2025	20
Gambar 7.	Pengelola Sistem Resi Gudang Ikan dan Rumput Laut.....	29
Gambar 8.	Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Rumput Laut.....	31
Gambar 9.	Rapat persiapan pameran rumput laut skala internasional Food Ingredients Europe 2025	32
Gambar 10.	Rapat pembahasan substansi permen KP SHTI	36
Gambar 11.	Rapat ASEAN TUNA Working Group ke-32	37
Gambar 12.	Perkembangan Pemenuhan Persyaratan Ekspor ke pasar AS terkait Marine Mammals Protection Act (MMPA).....	39
Gambar 13.	Pembahasan Analisis Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Terhadap Kinerja Impor Udang Beku Amerika Serikat.....	40
Gambar 14.	Bimbingan Teknis Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan	41
Gambar 15.	Training Audit Internal Hazard Analysis and Critical Control Points	45
Gambar 16.	Training Pembina Mutu Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	45
Gambar 17.	Workshop GAP Assessment STELINA dengan Standar Global..	51
Gambar 18.	Kegiatan Safari Gemarikan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Polewali Mandar.....	54
Gambar 19.	Workshop Penghitungan AKI Tahun 2024	56
Gambar 20.	Monitoring dan Updating Pendataan VPO Skala Mikro Kecil Tahun 2025	58
Gambar 21.	Rapat Pembahasan Paket dan Spesifikasi Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan TA 2025	61
Gambar 22.	Rapat identifikasi klaster perluasan ruang lingkup SNI produk....	67
Gambar 23.	Inhouse training bedah SNI produk perikanan.....	69
Gambar 24.	Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Layanan Pengujian dan Sertifikasi Penilaian Kesesuaian	70
Gambar 25.	Surveilans PT Heinz ABC Indonesia	71
Gambar 26.	Witness pelaksanaan surveilans Klien LSPRO-HP	72
Gambar 27.	Uji banding antar laboratorium dengan parameter bakteri Enterococci dan Escherichia coli dan Coliform	73
Gambar 28.	Pengolahan Makanan Modern di Desa Miskin Ekstrim, SMAN 1 Praya Barat	74
Gambar 29.	Focus Group Discussion (FGD) pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal BBP3KP	75

Gambar 30. Penandatanganan Kerjasama Pembentukan Perwakilan LP3H dengan PSH UNUSIA	76
Gambar 31. Rapat Kaji Ulang Dokumen Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	76
Gambar 32. Peringatan HUT ke 80 Republik Indonesia di BBP3K	80
Gambar 33. Kegiatan Fasilitasi UMKM KP pada Akses Pembiayaan dan Literasi Keuangan	85
Gambar 34. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Ditjen PDSPKP 2025	89
Gambar 35. Rapat Penilaian Mandiri SAKIP	89
Gambar 36. Pembahasan finalisasi data dukung LKE SAKIP Tahun 2025.....	90
Gambar 37. Rapat Penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian IKU ...	90
Gambar 38. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode September Tahun 2025	91
Gambar 39. Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.	91
Gambar 40. Kegiatan Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	93
Gambar 41. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai.....	93
Gambar 42. Konsultasi Publik Rancangan Permen KP tentang Indikasi Geografis Hasil KP	94
Gambar 43. Sosialisasi Permen KP No. 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

109

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Rancangan Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Rancangan Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan baik berdasarkan Rancangan Renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja triwulan III tahun 2025 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada Triwulan III Tahun 2025 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

3. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

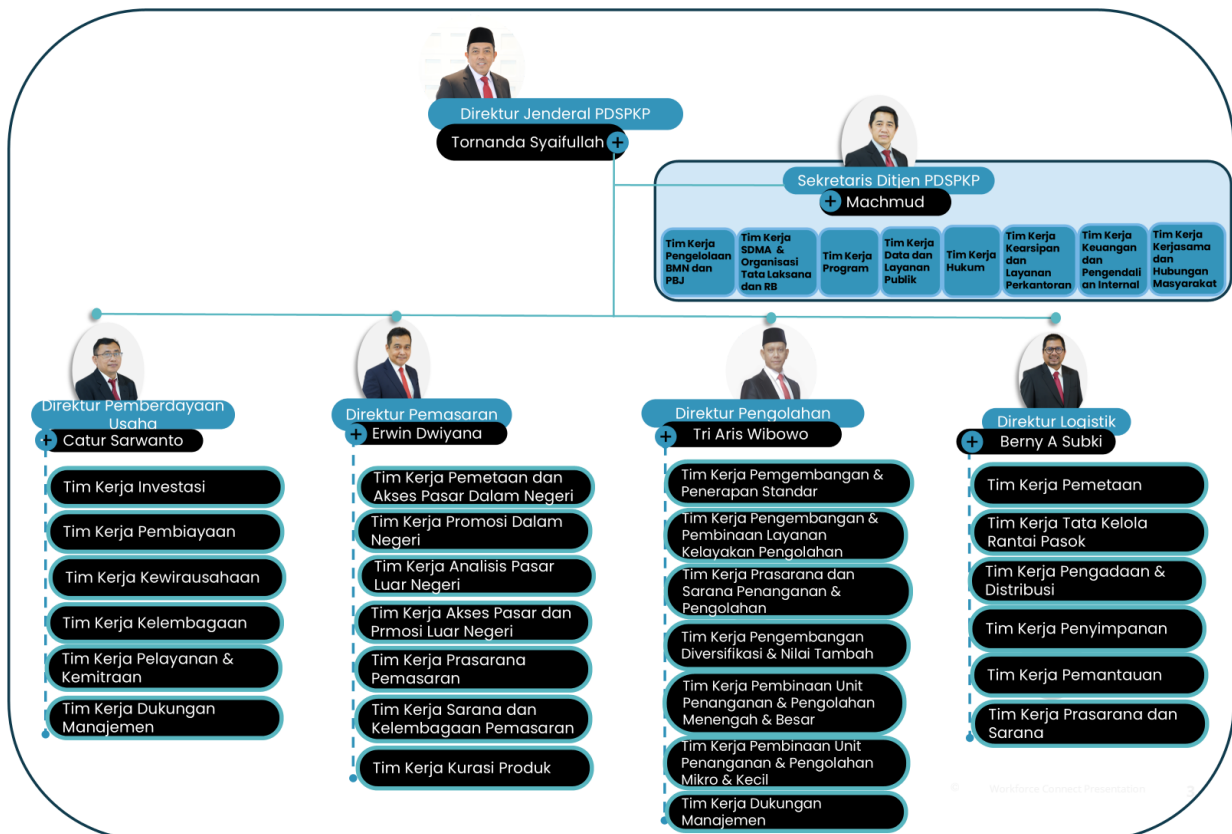
1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan,

serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Direktorat Logistik; Direktorat Pemberdayaan Usaha; Direktorat Pengolahan; Direktorat Pemasaran.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

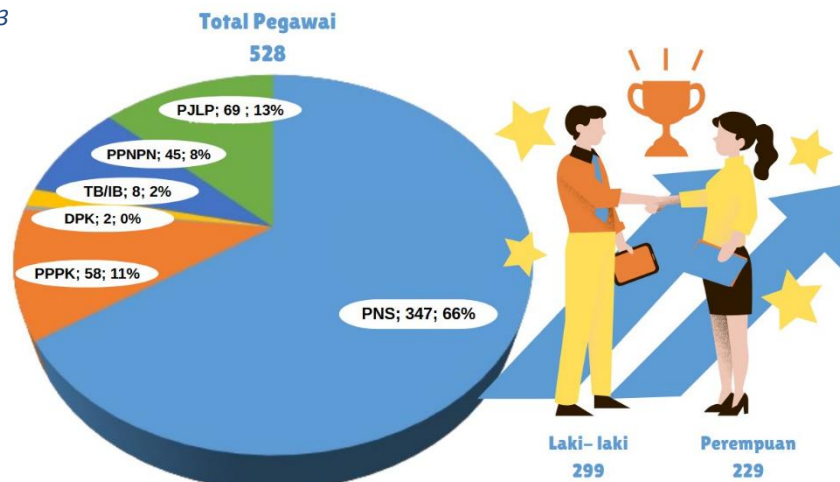


Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP

4. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2025 mencapai 518 orang yang terdiri dari 297 pegawai Laki-laki dan 229 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3



Gambar 4. Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2025

Keterangan:

Total jumlah pegawai adalah 528 orang, terdiri dari 347 PNS, 58 PPPK, 2 DPK, TV/IB, 45 PPNPN dan 69 PJLP. (299 laki-laki dan 229 Perempuan)

5. Permasalahan Utama

A. Permasalahan dan Tantangan Dalam Negeri

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Kedepan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Produksi ikan yang bersifat musiman juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Data statistik perikanan tangkap menunjukkan produksi ikan laut sangat fluktuatif sepanjang tahun dan mengalami musim puncak, musim, sedang, dan musim paceklik penangkapan ikan. Pada musim puncak produksi ikan sangat berlimpah, sementara di musim paceklik hasil tangkapan susah didapat. Pola musim tersebut juga bisa berbeda di setiap wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Hal ini kemudian menjadi pemicu terjadinya disparitas produksi ikan yang tinggi antar wilayah kepulauan Indonesia.

Disparitas yang menonjol berikutnya dan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional di bidang kelautan dan perikanan adalah disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan. Saat ini, sekitar 82% produksi perikanan tangkap berada di luar Jawa, sedangkan 45% sebaran UPI tersebar di Pulau Jawa. Dampaknya, banyak industri pengolahan ikan kekurangan bahan baku dalam waktu lama yang berakibat pada penghentian aktivitas industri bahkan PHK. Hal itu selalu terjadi setiap tahun, meskipun pada waktu yang sama produksi ikan di Wilayah Indonesia Timur tinggi. Ke depan, hal ini perlu dicari jalan keluar yang tepat, yang tidak merugikan pelaku UPI dan juga nelayan. UPI banyak dikembangkan di Pulau Jawa lebih karena kedekatan dengan pasar potensial yang sebagian besar berada di wilayah Jawa.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan adalah dengan penguatan sistem logistik ikan. Sistem logistik ikan dapat membantu UPI mendapatkan bahan baku ikan secara kontinyu, sekaligus mendukung distribusi dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang banyak tersebar di Kawasan Indonesia Timur. Namun ternyata sistem logistik ini juga masih menemui banyak kendala terutama terkait konektivitas antar wilayah. Dalam 5 tahun terakhir, kinerja logistik ikan nasional berada di angka 60-70 (skala 1-100). Hal perlu ditingkatkan antara lain melalui penyiapan ekosistem logistik yang baik dan efisien. Koordinasi, kerjasama, dan simbiosisitas aktivitas diantara pelaku logistik perlu ditingkatkan, begitu juga dukungan pemerintah melalui kebijakan taktis yang memicu berkembangnya aktivitas logistik ikan perlu diupayakan. Hal ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas logistik ikan di wilayah produksi, pengumpulan, dan pasar, yang sekaligus memperkuat konektivitas wilayah-wilayah tersebut.

Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit. Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalannya dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Untuk mendukung ekspansi bisnis dan pasar produk kelautan dan perikanan, terutama dalam memperluas jaringan ke pasar ekspor, maka ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar perlu ditingkatkan, serta persyaratan, penyelesaian hambatan dan diplomasi perdagangan perlu diperkuat. Saat ini, informasi produksi seperti musim ikan, jadwal tebar dan panen hanya terjalin antar nelayan, pemilik kapal, pembudidaya, penyedia pakan, dan penyedia perbekalan, sementara informasi pasar hanya

terjadi diantara pedagang, pengumpul, dan pelaku ekspor. Ke depan jalur informasi tersebut perlu diperluas dan dikembangkan dari hulu ke hilir, sehingga semua pelaku usaha/bisnis perikanan dapat saling mendukung dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama. Hal ini penting untuk peningkatan efisien dan pemanfaatan maksimal peluang pasar yang ada. Terkait persyaratan pasar dan hambatan pasar, akan selalu terjadi karena negara importir memiliki regulasi tersendiri atas produk impor dan berupaya melindungi pasar domestik produk mereka. Saat ini ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia masih bertumpu pada pasar tradisional negara tujuan (AS, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa), sementara diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, dan UPI terutama yang berskala mikro kecil belum menerapkan prinsip mutu produk ekspor yang baik. Hal ini perlu dipecahkan secara komprehensif, dimana perundingan penyelesaian hambatan ekspor, harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu produk ekspor dan pengembangan intellegent pasar yang membantu diversifikasi pasar produk perikanan dan kelautan. Perwakilan dagang RI di luar negeri (*Indonesia Trade Promotion Center*) dapat membantu dari segi diplomasi

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan kelautan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu,

fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri.

B. Permasalahan dan Tantangan Global

Permintaan global terhadap produk-produk *seafood* dipenuhi melalui jaringan perdagangan yang kompleks dan tersebar di berbagai belahan dunia. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kesadaran konsumen terhadap pola makan sehat, permintaan ini terus tumbuh, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perikanan global. Pada tahun 2023, total nilai impor produk perikanan dunia mencapai USD 184,54 miliar, mengalami penurunan 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, rata-rata pertumbuhan impor perikanan dari 2017 hingga 2023 sebesar 3,16% menunjukkan potensi perkembangan yang berkelanjutan. Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang menjadi importir terbesar.

Tahun 2023 Uni Eropa mendominasi pasar global dengan nilai impor USD 61,85 miliar, meski pertumbuhannya hanya 0,05%. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan USD 27,38 miliar, meski turun 16,23%. Tiongkok dan Jepang juga berkontribusi signifikan dengan nilai impor masing-masing USD 23,32 miliar dan USD 14,37 miliar, keduanya mengalami penurunan masing-masing 0,59% dan 9,21% dari tahun sebelumnya (YoY). Pada tahun 2023, impor perikanan dunia didominasi oleh komoditas trout dan salmon, dengan nilai mencapai USD 35,87 miliar, mencakup 19,4% dari total perdagangan perikanan global, dan tumbuh 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang berada di posisi kedua dengan nilai USD 27,00 miliar, menyumbang 14,6%, namun mengalami penurunan sebesar 13,9%. Tuna, tongkol, dan cakalang mencatat nilai impor USD 15,92 miliar (8,6% dari total), dengan penurunan 5,8%. Cumi-cumi, sotong, dan gurita mencatat impor USD 11,44 miliar (6,2% dari total), meskipun turun 2,7%. Tepung dan pakan ikan berkontribusi USD 6,50 miliar (3,5%), dengan penurunan 0,2%. Nilai impor kepiting atau rajungan sebesar USD 5,92 miliar (3,2%), turun 20,6%. Ikan cod mencatat impor USD 5,49 miliar (3,0%), dengan penurunan 9,5%.

Indonesia masih menjadi importir *seafood* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor produk perikanan sekitar 366.791,62 ton. Impor ini mencakup berbagai jenis *seafood*, termasuk ikan segar, beku, dan olahan mulai dari makarel hingga rumput laut. Nilai impor hasil perikanan Indonesia pun bervariasi dengan makarel menjadi komoditas impor terbesar sebesar USD 136,98 juta. Di sisi lain, ikan Cod dan Rumput Laut mencatat nilai impor yang lebih rendah, masing-masing sekitar USD 36,55 juta dan USD 33,96 juta. Udang dan Cumi-Sotong-Gurita memiliki nilai impor paling kecil, masing-masing USD 38,78 juta dan USD 19,93 juta. Komoditas lain seperti Tepung Ikan juga memiliki nilai impor tinggi hingga USD 64,59 juta.

Saat ini, negara-negara eksportir terbesar di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Ekuador, dan Chili. Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor sebesar USD 20,68 miliar, mencakup 11,18% dari total perdagangan dunia, meskipun turun 11,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Norwegia berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 16,05 miliar (8,68% dari total), dan mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,80%. Ekuador dan Chili masing-masing mencatat nilai ekspor USD 9,04 miliar (4,89%) dan USD 8,89 miliar (4,81%), dengan Ekuador mengalami penurunan 10,72%, sementara Chili tumbuh 1,71%. Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan nilai ekspor USD 5,6 miliar, berkontribusi 3,03% terhadap total perdagangan perikanan dunia.

Beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan di pasar global, dengan pangsa pasar yang relatif kecil dan kalah bersaing dibandingkan negara-negara lain. Salah satu contoh adalah udang, yang menjadi andalan ekspor Indonesia dengan kontribusi sebesar 30,7% dari total ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2023. Meskipun demikian, Indonesia hanya berada di peringkat kelima sebagai eksportir udang utama dunia, di bawah Ekuador yang memiliki pangsa pasar 25,6%, India (17,3%), Vietnam (10,3%), dan Tiongkok (6,8%).

Ekspor udang Indonesia juga tengah menghadapi tantangan di pasar Amerika Serikat, yang merupakan importir udang terbesar di dunia. Berdasarkan hasil Preliminary Determination dari United States Department of Commerce

(USDOC), Indonesia dinyatakan melakukan tindakan dumping pada periode investigasi 1 September 2022 hingga 31 Agustus 2023. Akibatnya, sejak 1 Juni 2024, ekspor udang beku Indonesia dikenakan tambahan tarif anti-dumping sementara sebesar 6,3%. Besaran tarif anti-dumping final akan ditetapkan setelah penerbitan *Final Determination* secara resmi oleh USDOC. Selain itu, Indonesia juga belum terdaftar sebagai negara yang dapat mengekspor udang hasil tangkapan (*certified nation*) ke Amerika Serikat, yang menyebabkan kendala tambahan bagi ekspor udang Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan produsen utama tuna-cakalang-tongkol dunia, dengan produksi mencapai 1,35 juta ton pada tahun 2022, setara dengan 19,1% dari total produksi dunia menurut FAO 2024. Namun, kontribusi besar ini belum tercermin dalam pangsa pasar tuna-cakalang-tongkol Indonesia di dunia. Pada tahun 2023, Indonesia hanya menempati peringkat kelima eksportir utama tuna-cakalang-tongkol dengan pangsa pasar 6,2% atau setara dengan USD 1,73 miliar, masih di bawah Thailand (14,7%), Spanyol (9,8%), Ekuador (8,7%), dan Tiongkok (7,4%).

Tantangan lainnya datang dari pengenaan tarif tinggi untuk produk olahan (*tariff escalation*) oleh Uni Eropa dan Jepang, yang merupakan importir utama tuna-cakalang-tongkol dunia. KKP terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Melalui forum *Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement* yang ditandatangani pada 8 Agustus 2024, disepakati penurunan tarif tuna-cakalang-tongkol kaleng dan olahan lainnya menjadi 0%, yang ditargetkan berlaku efektif pada awal tahun 2025. Negosiasi serupa berlangsung dalam forum *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*, yang bertujuan menurunkan tarif impor produk tuna olahan Indonesia dari 24% menjadi 0%.

Indonesia juga hanya menempati peringkat kelima dan keempat sebagai eksportir global untuk komoditas cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting. Pada tahun 2023, ekspor cumi-sotong-gurita Indonesia mencapai USD 762,59 juta dengan pangsa pasar 5,9%, berada di bawah Tiongkok (30,6%), Spanyol (10,3%), Maroko (8,4%), dan Peru (6,5%). Sementara itu, ekspor rajungan-

kepiting Indonesia mencapai USD 447,65 juta dengan pangsa pasar 7,3%, di bawah Rusia (30,6%), Kanada (18,4%), dan Tiongkok (10,5%).

Namun, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik sebagai eksportir rumput laut. Pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai eksportir rumput laut dunia dengan nilai ekspor sebesar USD 433,72 juta dan pangsa pasar 13,8%, hanya kalah dari Tiongkok yang memiliki pangsa pasar 22,0%. Potensi peningkatan ekspor rumput laut Indonesia sangat besar, terutama karena ekspor saat ini didominasi oleh rumput laut kering dengan kontribusi 65,7%, yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Produksi karaginan Tiongkok sangat bergantung pada bahan baku impor dari Indonesia, khususnya *Kappaphycus alvarezii* (Cottonii) dan *Eucheuma denticulatum* (Spinosum), dengan volume impor sebesar 117.004 ton atau setara dengan 92,8% dari total impor Dried *Eucheuma* oleh Tiongkok (Zhang, J., et.al, 2023). Posisi komoditas utama Indonesia di pasar global tahun 2023

Tantangan lainnya pada industri perikanan Indonesia adalah masalah keamanan pangan, dimana kontaminasi oleh bakteri patogen seperti *Salmonella*, *Listeria*, dan *Vibrio* dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kontaminasi ini bisa terjadi sepanjang rantai pasok, mulai dari lingkungan alam, selama proses penangkapan, hingga tahap pengolahan dan distribusi. Di samping itu, munculnya produk substitusi berbasis sel dan tumbuhan juga menjadi tantangan baru bagi industri perikanan tradisional. Produk-produk ini semakin dilirik karena dianggap lebih berkelanjutan dan etis, mengingat proses produksinya tidak melibatkan penangkapan ikan dan dapat dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Walaupun saat ini produk substitusi tersebut masih dalam tahap pengembangan, potensi pertumbuhannya sangat besar dan bisa menjadi pesaing serius bagi produk perikanan konvensional di masa depan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, sektor kelautan dan perikanan Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri perikanan global, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan

masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi rumput laut, tuna, dan komoditas perikanan lainnya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



Gambar 5. Sistematika Peyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rancangan Rencana Strategis

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025-2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Visi Indonesia Emas 2045 didasari oleh landasan pemikiran tentang visi abadi Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden ini juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Presiden dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Untuk mendukung agenda pembangunan/penguatan transformasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung 2 arah kebijakan KKP yaitu sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan :

- 1) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan
- 2) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan

b. Strategi

- 1) Hilirisasi penangkapan ikan berbasis komoditas unggulan
- 2) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha
- 3) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional
- 4) Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah
- 5) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan
- 6) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat
- 7) Penguatan pasar luar negeri

Selanjutnya upaya transformasi super prioritas (*Game Changers*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah:

- Industrialisasi yang berorientasi pada hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
- Ketahanan energi dan air, serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*)

B. Misi

Dalam rangka rangka mencapai visi dan dua agenda pembangunan/penguatan transformasi yang didukung, maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) perlu menentukan misi yang akan dilakukan untuk tahun 2025-2029. Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Misi KKP.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. “Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- b. “Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Misi Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- c. “Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan Misi Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan

mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

- d. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan
- e. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas” yang menjabarkan Misi Asta Cita 7, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari lima misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

- a. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
- b. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

C. Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025-2029. Mengacu rancangan Renstra KKP tahun 2025-2029, ada lima tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;

- b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- c. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- e. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

Dari lima tujuan tersebut yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah “meningkatkan mutu dan daya saing hasil produk kelautan dan perikanan”. Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025-2029.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2024, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

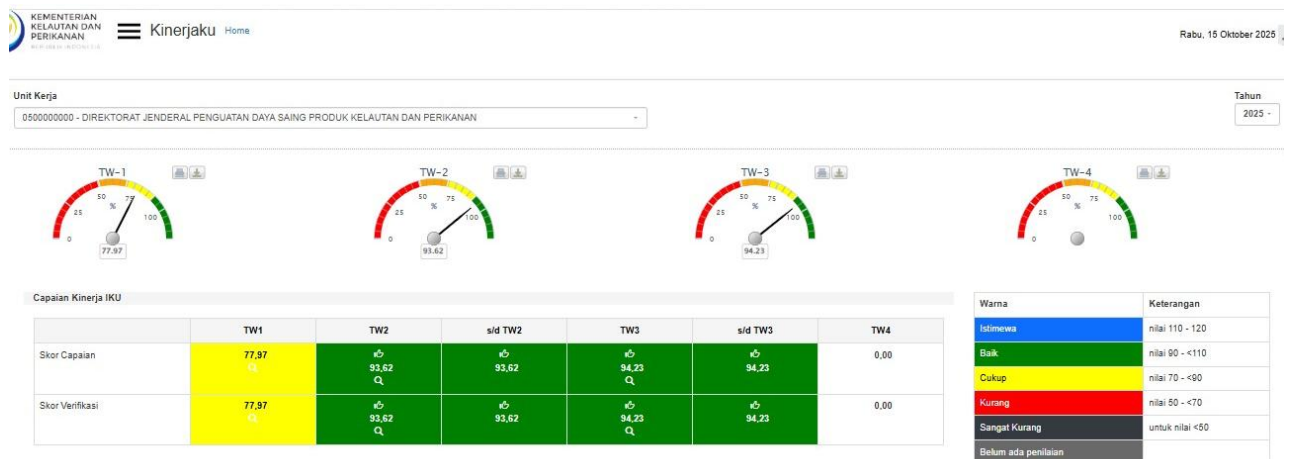
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar)	0,57
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,70
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan September 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 94,23 (Kategori Baik). Capaian NKO pada Triwulan III tahun 2025 sebagaimana terdapat pada Gambar 6.



Gambar 6. Capaian NKO pada Triwulan III tahun 2025

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2025	Persentase terhadap Target (%)		
	Tahun 2025	TW III 2025		Tahun 2025	TW III 2025	
1	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD miliar)	0,57	0,41	0,24*	42,11	58,54
2	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,68	4,08	4,25*	74,82	104,17
3	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51	-	-	-	-
4	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5	1,50	1,80	36	120
5	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	-	-	-	-

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

A. Nilai Ekspor Rumput Laut

Ekspor rumput laut merupakan kegiatan pengiriman komoditas rumput laut dari wilayah pabean Indonesia ke luar negeri, baik untuk tujuan komersial

maupun non-komersial seperti hibah, sumbangan, atau hadiah. Kegiatan ini juga mencakup pengiriman rumput laut untuk diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke Indonesia. Nilai ekspor rumput laut dihitung berdasarkan total nilai seluruh kode *Harmonized System (HS)* terkait rumput laut sebagaimana tercantum dalam *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022*, dan dinyatakan dalam satuan dolar Amerika Serikat (USD).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar)	0,41	0,27	-	0,57	0,24*	0,15	-	0,24*	58,54	42,11	33,33	-

*Prognosa sampai dengan September 2025
Sumber Data: BPS, Diolah Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan prognosa capaian sampai dengan September 2025 dengan menggunakan data historis (*time series*) tahun sebelumnya. Pendekatan ini digunakan karena terdapat jeda waktu publikasi data ekspor oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar dua bulan yang menjadi sumber utama data resmi ekspor nasional. Berdasarkan hasil perhitungan prognosa tersebut, nilai ekspor rumput laut hingga triwulan III tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 0,24 miliar. Capaian ini setara dengan 58,54% dari target ekspor triwulan III tahun 2025 yang ditetapkan sebesar USD 0,41 miliar, dan 42,11% dari target ekspor tahun 2025 sebesar USD 0,57 miliar. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun berjalan, maka capaian pada triwulan III mengalami pertumbuhan sebesar 33,33%. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Hasil perhitungan prognosa hingga triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor rumput laut Indonesia belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh tren penurunan volume dan nilai ekspor

pada komoditas karaginan dan rumput laut kering dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*).

Secara komposisi, ekspor rumput laut Indonesia terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu rumput laut kering, karaginan, dan agar-agar. Hingga bulan Agustus 2025, nilai ekspor karaginan tercatat menurun sebesar 15,78 persen, sedangkan nilai ekspor rumput laut kering turun 6,42% (*y-o-y*). Sebaliknya, ekspor agar-agar mengalami peningkatan sebesar 2,31 persen pada periode yang sama.

Penurunan ekspor karaginan dan rumput laut kering berdampak signifikan terhadap total kinerja ekspor rumput laut nasional, mengingat kedua komoditas tersebut menyumbang sekitar 93,8% dari total nilai ekspor rumput laut Indonesia. Saat ini, Tiongkok masih menjadi pasar utama dengan kontribusi lebih dari 68% terhadap total nilai ekspor rumput laut Indonesia. Ketergantungan yang tinggi pada satu pasar utama tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi kinerja ekspor nasional.

Hingga bulan Agustus 2025, ekspor rumput laut Indonesia ke Tiongkok tercatat mengalami penurunan baik dari sisi volume maupun nilai, masing-masing sebesar 5,1 persen dan 8,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada ekspor karaginan yang turun sebesar 21,1 persen, dari USD 39,54 juta pada tahun 2024 menjadi USD 31,19 juta pada tahun 2025. Sementara itu, nilai ekspor rumput laut kering juga menurun sebesar 5,1 persen, dari USD 112,47 juta menjadi USD 108,70 juta.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan dari industri pengolahan di Tiongkok yang selama ini menjadi konsumen utama produk turunan rumput laut Indonesia. Sejumlah industri di negara tersebut diketahui mulai mengganti bahan baku rumput laut, khususnya jenis *Eucheuma cottonii* yang digunakan untuk menghasilkan karaginan, dengan bahan pengental alternatif (*gum substitutes*) yang dinilai lebih murah dan mudah diperoleh. Pergeseran bahan baku ini berdampak langsung pada berkurangnya permintaan terhadap rumput laut asal Indonesia.

Selain faktor permintaan, tantangan struktural lain yang turut mempengaruhi daya saing ekspor adalah perbedaan kapasitas pengolahan

antara Indonesia dan Tiongkok. Saat ini, rasio kapasitas pengolahan kedua negara diperkirakan mencapai 1 banding 4. Skala industri yang jauh lebih besar di Tiongkok membuat negara tersebut mampu menekan biaya produksi dan menawarkan harga jual yang lebih rendah di pasar global. Kondisi ini menyebabkan produk rumput laut Indonesia menjadi kurang kompetitif, terutama pada segmen pasar yang sensitif terhadap harga.

Saat ini, ekspor rumput laut Indonesia ke Tiongkok masih didominasi oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sementara serapan bahan baku oleh industri dalam negeri (PMDN) masih relatif terbatas. Ketimpangan ini terlihat dari rasio kapasitas produksi antara perusahaan PMA dan industri lokal yang mencapai sekitar 30 banding 1. Dominasi perusahaan PMA tersebut menunjukkan masih rendahnya kemampuan industri domestik dalam menyerap dan mengolah bahan baku rumput laut secara optimal.

Selain faktor internal, tekanan terhadap kinerja ekspor juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada menurunnya permintaan pasar dari negara-negara tujuan ekspor utama lainnya. Kondisi ini mengakibatkan penurunan aktivitas industri hilir di luar negeri dan berujung pada menurunnya permintaan terhadap bahan baku seperti rumput laut dari Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan capaian ekspor rumput laut pada triwulan ke-IV 2025, beberapa kegiatan terkait promosi biodiversitas rumput laut Indonesia yang terdiri dari 1.006sp dan potensinya dilaksanakan di dua (2) forum internasional. Strategi promosi ini juga ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas akses pasar rumput laut Indonesia di pasar global.

1. Peningkatan akses pasar di wilayah Asia-Pasifik melalui partisipasi Busan *International Seafood & Fisheries Expo 2025 (BISFE 2025)*

Pameran BISFE merupakan event pameran tahunan yang telah rutin dilaksanakan sejak 2008 oleh *Korea Fish Trade Association*. Pameran BISFE 2025 dilaksanakan di kota Busan, Korea Selatan pada 5-7 November 2025, pameran merupakan platform perdagangan produk perikanan yang mempertemukan produsen, *supplier*, distributor dan pembeli dari berbagai negara dari kawasan Asia Pasifik. Pada pameran BISFE 2025, pelaku usaha

rumpaut laut diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan ragam produk olahan rumput laut dan meningkatkan brand awareness akan produk rumput laut Indonesia di pasar global. Selain itu pelaku usaha rumput laut diharapkan dapat akan menambahkan jejaring bisnis dengan pelaku industri di kawasan Asia Pasifik (APAC) sekaligus mengetahui tren pasar ke depan dan preferensi konsumen rumput laut di wilayah APAC

2. Peningkatan akses pasar di wilayah Eropa melalui event *Food Ingredients Europe* (FIE)

Pameran *Food Ingredients* merupakan salah satu pameran pangan terbesar yang dilaksanakan per-2 tahun sekali sejak 1986 oleh *Informa markets*. Untuk tahun 2025, pameran Food Ingredients Europe (FIE) akan diselenggarakan di Paris *Expo Porte de Versailles*, Paris, Prancis, pada tanggal 2–4 Desember 2025. Pelaksanaan pameran FIE di 2025 ini juga merupakan edisi ke-30 dari pameran pangan berskala global yang menyatukan produsen bahan baku, pemasok, pembeli, ahli R&D, pelaku produksi dan penyedia solusi industri pangan dari seluruh dunia. Keikutsertaan pelaku usaha rumput laut Indonesia dalam FIE 2025 juga didukung dengan booth paviliun Indonesia dimana dengan adanya *booth* ini akan lebih memudahkan pertukaran informasi kepada para pengunjung dan memudahkan promosi terkait keunggulan sektor rumput laut di Indonesia. Pelaku usaha rumput laut Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin “*window of opportunity*” yang ada pada FIE 2025 untuk lebih meningkatkan ekspor ke pasar Eropa yang memiliki permintaan tinggi terhadap bahan baku alami dan *sustainable*, termasuk produk turunan rumput laut seperti *carrageenan*, agar-agar, dan *alginate*.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini dan sebagai tindaklanjut rekomendasi pada triwulan sebelumnya antara lain:

a. Fasilitasi Perizinan Berusaha Komoditas Rumput Laut

Sebagai bagian dari upaya mempercepat legalisasi dan standarisasi usaha sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Pemberdayaan Usaha,

Ditjen PDSPKP, telah melaksanakan serangkaian fasilitasi dan evaluasi perizinan berusaha terhadap pelaku usaha pengolahan dan pemasaran rumput laut, yaitu PT Magellan Biotechnology Nusantara, PT Zhongyi Supply Chain Service, PT BPH Global Indonesia, dan PT Panen Laut Lestari.

Kegiatan fasilitasi dilaksanakan dalam bentuk rapat verifikasi kelengkapan standar usaha pada tanggal 12 Agustus, 22 Agustus, dan 4 September 2025, dengan melibatkan unsur Pusdatin, Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, dan BBP3KP. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan kelengkapan komitmen, kesesuaian data OSS-RBA dengan rencana usaha, serta validitas dokumen teknis dan legalitas perusahaan sebagai prasyarat penerbitan Sertifikat Standar Usaha. Hasil fasilitasi menunjukkan kemajuan signifikan pada keempat perusahaan:

- 1) PT Magellan Biotechnology Nusantara difasilitasi dalam penyempurnaan dokumen rencana usaha dan klarifikasi volume bahan baku serta pemasaran produk rumput laut kering. Perusahaan juga sedang melengkapi dokumen pendukung sertifikasi mutu dan izin edar produk bioteknologi.
- 2) PT Zhongyi Supply Chain Service mendapatkan pendampingan dalam penyesuaian KBLI kegiatan, konfirmasi proses produksi (termasuk penjemuran), serta verifikasi sarana distribusi dan nilai investasi.
- 3) PT BPH Global Indonesia difasilitasi dalam penyesuaian KBLI menjadi 10298 sesuai kegiatan pengeringan rumput laut, pembaruan data tenaga kerja, penambahan mesin dan tata letak, serta konfirmasi status bangunan dan kepemilikan gudang.
- 4) PT Panen Laut Lestari dibimbing untuk melengkapi nilai investasi sarpras, menyesuaikan kategori risiko kegiatan, dan memperbaiki tata letak fasilitas produksi sesuai standar.

Dari hasil rapat evaluasi, seluruh perusahaan telah memperoleh masukan dan arahan untuk penyempurnaan komitmen sebelum proses penerbitan Sertifikat Standar Usaha (SS) dapat disetujui. Kegiatan ini juga memperkuat

sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem industri rumput laut yang legal, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Dengan demikian, fasilitasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi investasi, memperlancar rantai pasok, serta mendukung peningkatan ekspor dan nilai tambah komoditas rumput laut Indonesia.

b. Optimasi Sarana Pasca Panen Rumput Laut

Dalam rangka optimasi sarana pasca panen rumput laut, pada tanggal 21 Agustus 2025 Ditjen PDSPKP telah melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana pasca panen rumput laut di Kab. Rote Ndao. Hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan laporan dari pengelola (Yayasan Vokasi Nusa Tenggara), gudang jamur dan sarana pasca panen yang dibangun tahun 2024 sudah dimanfaatkan secara penuh oleh Yayasan Vokasi. Pada tahun 2024 tercatat nilai penjualannya mencapai Rp. 800 juta. Saat ini harga rumput laut basah di pembudidaya adalah Rp. 3.000,-/kg.
- 2) Untuk pengembangan “modelling rumput laut” di Rote Ndao, pihak Yayasan Vokasi Nusa Tenggara telah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a) Mengedukasi masyarakat untuk menghasilkan produk turunan sederhana dari rumput laut antara lain keripik rumput laut, manisan, kopi rumput laut, selai, dan sambal olahan laut/ Produk ini berpotensi memperluas pasar domestik maupun ekspor.
 - b) Membangun Galeri Rumput Laut sebagai etalase produk, pusat edukasi, dan wisata berbasis perikanan.
 - c) Mencatat produksi dari pembudidaya secara detil sehingga memudahkan “tracebility”
 - d) Berkolaborasi dengan perguruan tinggi (Politeknik Perikanan Kupang, Universitas Nusa Cendana) untuk pendampingan teknis, riset, dan penguatan SDM.
 - e) Membangun branding rumput laut Rote Ndao yang ramah lingkungan dan organik

- f) Yayasan Vokasi Nusa Tenggara mempunyai rencana untuk pabrik rumput laut di Rote Ndao. Untuk itu sedang dirintis kebun-kebun bibit dan gudang/tempat pengolahan rumput laut.

c. Pemantauan Stok Rumput Laut melalui Sistem Resi Gudang (SRG)

Pengelola gudang SRG rumput laut sampai September 2025 berjumlah 20 pengelola dengan penambahan 3 gudang SRG rumput laut di tahun 2025 yaitu gudang PT. Wahana Pronatural, Gudang PT. Asia Sejahtera Mina Pattene, Gudang A (gudang kemas), dan Gudang B dari PT. Giwang Citra Laut. Realisasi penerbitan resi gudang rumput laut pada Triwulan III (sampai dengan 30 September 2025) tercatat 2 resi gudang rumput laut yang diterbitkan oleh PT Wahana Pro Natural di Makassar dengan volume sebesar 400 ton, dan belum mendapatkan pembiayaan.

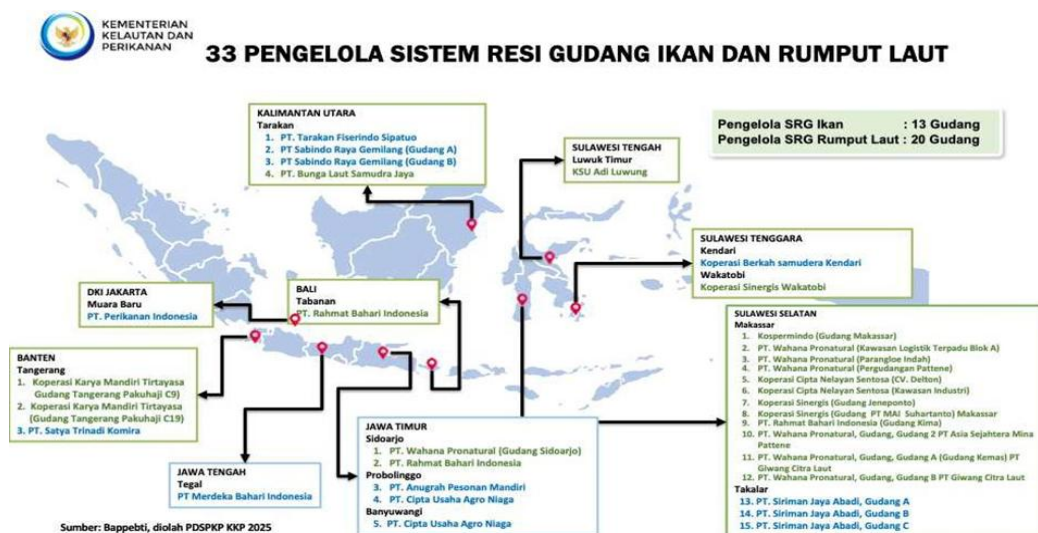
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk memperluas SRG antara lain:

- a). Komoditas perikanan yang dapat diresigudangkan mencakup ikan, telur ikan terbang, rumput laut kering, garam, tepung agar, dan karaginan yang ditetapkan dengan Permendag No.1 Tahun 2025, dan melalui Surat No. B.217/DJPDSPKP.2/PDS.110/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 telah diusulkan kepada BAPPEBTI penambahan ikan kayu dan ikan asap guna memperluas pemanfaatan SRG sebagai instrumen pembiayaan. Kajian analisis oleh BAPPEBTI masih berlangsung melalui pengumpulan data dan FGD dengan target konsinyering Oktober 2025 dan laporan akhir November 2025.
- b). Penguatan akses pembiayaan SRG dengan BRI didukung Direktorat Pemberdayaan Usaha telah dilakukan pada 22 September 2025. Target penyaluran BRI tahun 2025 sebesar Rp 60 Miliar dengan potensi pembiayaan SRG Rp 39,3 miliar. Realisasi Agustus 2025 telah mencapai Rp 20,7 miliar dan BRI menyiapkan skema pembiayaan subsidi SRG di tahun 2025 dan pembiayaan komersial untuk tahun 2026. BRI siap melakukan sosialisasi kepada 33 pengelola SRG (termasuk 20 pengelola SRG rumput laut) bersama Ditjen PDSPKP dan

berkomitmen menyediakan kontak person BRI per wilayah untuk memudahkan komunikasi dengan calon pengelola SRG.

c). PKS Ditjen PDSPKP dengan BAPPEBTI akan berakhir 27 November 2025, dan pada 1 Oktober 2025 telah dilakukan pembahasan PKS secara daring yang menyepakati beberapa poin perubahan:

- Perubahan pimpinan BAPPEBTI
- Tujuan PKS diperluas menjadi pengembangan, perluasan, dan percepatan implementasi SRG dan ruang lingkup kelembagaan menjadi satu kesatuan “pembinaan dan penguatan kelembagaan”.
- Mekanisme pelaksanaan berubah dari pembentukan Tim Pelaksana Eselon II menjadi penunjukan wakil-wakil sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- Tanggung jawab diperinci, mencakup pelaksanaan rencana aksi, pembinaan pelaku usaha, perubahan kewenangan BAPPEBTI menjadi pemrosesan pengajuan kelembagaan, serta penegasan peran PDSPKP dalam identifikasi, pemetaan, dan pembinaan.
- Ditambahkan pasal baru tentang kerahasiaan data yang mewajibkan PARA PIHAK menjaga dan mengamankan informasi sesuai peraturan.



Gambar 7. Pengelola Sistem Resi Gudang Ikan dan Rumput Laut

d. Webinar Biostimulant dan Pupuk Hayati Rumput Laut

Kegiatan Webinar Biostimulan dan Pupuk Hayati dengan tema *“Rumput Laut Mendukung Pertanian dan Budidaya Perikanan Berkelanjutan”* diselenggarakan pada tanggal 11 September 2025 secara daring melalui aplikasi zoom. Acara ini diselenggarakan oleh Ditjen PDSPKP bekerja sama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui program *Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia Fase 2*.

Webinar ini diikuti oleh sekitar 339 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah, asosiasi rumput laut, akademisi, peneliti, pelaku usaha budidaya perikanan, praktisi pertanian, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan produk turunan rumput laut. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil pengembangan biostimulan dan pupuk hayati berbasis rumput laut di Indonesia, mendiskusikan peluang pasarnya, serta mengulas kebijakan dan persyaratan perizinan yang berlaku bagi produk tersebut.

Secara keseluruhan, pengembangan biostimulan dan pupuk hayati berbasis rumput laut diyakini memiliki potensi besar dalam memperkuat keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan nasional. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan lebih lanjut, khususnya dalam hal fasilitasi perizinan edar, pengembangan pasar, dan peningkatan kapasitas produsen serta pelaku usaha. Untuk itu diperlukan pendampingan teknis bagi produsen biostimulan untuk memperoleh izin edar, penyediaan informasi terbaru mengenai perkembangan teknologi dan peluang pasar produk biostimulan berbasis rumput laut.

Gambar. Pelaksanaan Webinar Biostimulan dan Pupuk Hayati Rumput Laut

e. Koordinasi dengan Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI)

Dalam rangka penguatan daya saing di pasar global dan peningkatan ekspor komoditas rumput laut Indonesia, Ditjen PDSPKP melakukan koordinasi dan diskusi dengan Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) pada tanggal 25 September 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk

memperoleh masukan dari asosiasi pelaku industri terkait kondisi terkini pasar rumput laut global, tantangan yang dihadapi industri, serta upaya kolaboratif untuk memperkuat posisi produk rumput laut Indonesia di pasar internasional.

f. Pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Rumput Laut. Dalam upaya perumusan kerjasama pemasaran rumput laut, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pelaku melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 25 Januari 2025 antara:

- 1) Koperasi Produsen Mina Agar Makmur dengan PT. Agarindo Bogatama dengan nomor 01/PKS/KMAM-ABT.1/2025 dan 01/PKS/ABT-KMAM.1/2025 tentang Pemasaran Rumput Laut *Gracilaria* spp.
- 2) Koperasi Produsen Mina Agar Makmur dengan Kelompok Pembudidaya Tunas Makmur dengan nomor 02/PKS/KMAM-ABT.I/2025 dan 01/PKS/KTMKMAM.I/2025 tentang Pemasaran Rumput Laut



Gambar 8. Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Rumput Laut

g. Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut. Pemerintah menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan ekspor dan investasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor dan investasi harus dijaga agar terus meningkat karena basis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berdasarkan konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta. Ditjen PDSPKP melalui Direktorat Pemasaran telah melaksanakan rapat persiapan *business matching* pada tanggal 29 Juli 2025. *Business matching* akan dilaksanakan sebagai rangkaian dalam pameran *Food Ingredients Europe 2025* yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4

Desember 2025 di Paris. Rapat persiapan dimaksudkan untuk menjaring calon peserta *business matching*

Gambar 7. Rapat Business Matching Penumbuhan Eksportir Rumput Laut

- h. Ditjen PDSPKP telah melaksanakan rapat persiapan pameran rumput laut skala internasional. Rapat persiapan pameran rumput laut skala internasional *Food Ingredients Europe 2025* dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025. Pameran *Food Ingredients Europe 2025* akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Desember 2025 di Paris, Prancis. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Akses Pasar dan Promosi Luar Negeri dan dihadiri oleh eksportir rumput laut calon peserta FIE 2025. Rapat bertujuan untuk membahas persiapan keikutsertaan KKP pada pameran Food Ingredients Europe (FIE) 2025.



Gambar 9. Rapat persiapan pameran rumput laut skala internasional Food Ingredients Europe 2025

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut sebesar Rp1.250.000.000,- sampai dengan periode Triwulan III tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp 28.174.000,- atau setara dengan 5%.

B. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Komoditas produk perikanan lainnya merupakan hasil perikanan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir berupa ikan segar, ikan beku, serta berbagai produk olahan selain komoditas rumput laut. Ekspor produk perikanan lainnya merupakan kegiatan pengeluaran komoditas tersebut dari wilayah pabean Republik Indonesia (*the customs frontier*), baik untuk tujuan

komersial maupun non-komersial (hibah, sumbangan, atau hadiah) serta produk yang dikirim ke luar negeri untuk diolah lebih lanjut dan hasil olahannya kemudian dimasukkan kembali ke Indonesia. Nilai ekspor produk perikanan lainnya dihitung berdasarkan total nilai ekspor seluruh produk perikanan di luar komoditas rumput laut, dengan mengacu pada klasifikasi kode HS (*Harmonized System*) sebagaimana tercantum dalam *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022*, dan dinyatakan dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d TW III 2025			TW III 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)
Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	4,08	2,66	-	5,68	4,25*	2,80	-	4,25*	104,17	74,82	51,78	-

* Prognosa sampai dengan September 2025
Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Sehubungan dengan adanya jeda waktu publikasi data ekspor selama dua bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber utama data ekspor produk perikanan lainnya, maka Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan prognosa capaian hingga September 2025 dengan menggunakan data historis (*time series*) dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan prognosa tersebut, nilai ekspor produk perikanan lainnya sampai dengan triwulan III tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 4,25 miliar. Capaian tersebut setara dengan 104,17% terhadap target Triwulan III tahun 2025 sebesar USD 4,08 miliar, dan 74,82% terhadap target tahun 2025 sebesar USD 5,68 miliar. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun berjalan, maka capaian pada triwulan III mengalami pertumbuhan sebesar 51,78%. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–Agustus, volume ekspor produk perikanan lainnya (tidak termasuk rumput laut) menunjukkan peningkatan sebesar 1,3% yaitu dari 716,07 ribu ton pada tahun 2024 menjadi 725,65 ribu ton pada tahun 2025. Sementara itu, nilai ekspornya meningkat lebih signifikan, yaitu sebesar 8,0 persen, dari USD 3,50 miliar menjadi USD 3,79 miliar pada periode yang sama.

Peningkatan nilai ekspor tersebut terutama didorong oleh dua komoditas utama, yakni udang dan tuna–cakalang–tongkol (TCT). Ekspor udang mengalami kenaikan sebesar 10,5% dalam volume dan 19,2% dalam nilai, sedangkan ekspor TCT meningkat 8,4% dalam volume dan 2,5% dalam nilai. Kedua komoditas ini merupakan pilar utama ekspor perikanan Indonesia, dengan kontribusi mencapai 50,3% terhadap total nilai ekspor produk perikanan lainnya. Dominasi ekspor udang dan TCT tersebut tercermin pula pada struktur pasar tujuan ekspor, di mana sebagian besar permintaan berasal dari negara-negara mitra utama yang selama ini menjadi pangsa terbesar bagi produk perikanan Indonesia.

Negara tujuan utama ekspor produk perikanan lainnya masih didominasi oleh Amerika Serikat dengan pangsa 34,9%, disusul oleh ASEAN (16,3%), Tiongkok (15,0%), Jepang (10,4%), dan Uni Eropa (7,1%). Struktur pasar ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk perikanan Indonesia tetap kuat di negara-negara mitra utama, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga daya saing dan konsistensi suplai untuk mempertahankan posisi Indonesia di pasar global.

Selain dilihat dari persebaran pasar tujuan ekspor, kinerja ekspor produk perikanan lainnya juga dapat ditinjau berdasarkan kontribusi masing-masing komoditas utama yang mendominasi nilai ekspor nasional. Sampai dengan Agustus 2025, nilai ekspor produk perikanan lainnya di dominasi oleh empat komoditas utama, yaitu:

- 1). Udang

Komoditas udang masih menjadi penyumbang terbesar ekspor perikanan lainnya dengan nilai mencapai USD 1.234,71 juta. Pasar utama ekspor

udang Indonesia adalah Amerika Serikat dengan nilai USD 780,85 juta atau sekitar 63,2% dari total ekspor udang, diikuti oleh Jepang sebesar USD 204,08 juta (16,5%), Tiongkok sebesar USD 64,77 juta (5,2%), Uni Eropa sebesar USD 50,48 juta (2,6%), dan ASEAN sebesar USD 32,68 juta (2,02%).

2). Tuna–Cakalang–Tongkol (TCT)

Komoditas TCT menempati posisi kedua dengan nilai ekspor sebesar USD 668,11 juta. Pasar utama komoditas ini meliputi ASEAN sebesar USD 171,75 juta (25,7%), Amerika Serikat sebesar USD 130,49 juta (19,5%), Jepang sebesar USD 107,59 juta (16,1%), Uni Eropa sebesar USD 90,77 juta (13,6%), dan Timur Tengah sebesar USD 74,66 juta (11,2%).

3) Cumi–Sotong–Gurita (CSG)

Ekspor komoditas CSG tercatat mencapai USD 497,52 juta, dengan pangsa pasar terbesar di ASEAN sebesar USD 196,08 juta (39,4%) dan Tiongkok sebesar USD 173,35 juta (34,8%). Selain itu, ekspor ke Uni Eropa mencapai USD 45,54 juta (9,2%), Taiwan sebesar USD 20,43 juta (4,1%), dan Amerika Serikat sebesar USD 19,48 juta (3,9%).

4) Rajungan–Kepiting

Komoditas rajungan–kepiting mencatat nilai ekspor sebesar USD 338,75 juta. Pasar utama komoditas ini masih didominasi oleh Amerika Serikat dengan nilai USD 219,16 juta (64,7%), diikuti oleh Tiongkok sebesar USD 63,17 juta (18,6%), ASEAN sebesar USD 21,40 juta (6,3%), Uni Eropa sebesar USD 11,61 juta (3,4%), dan Jepang sebesar USD 7,10 juta (2,1%).

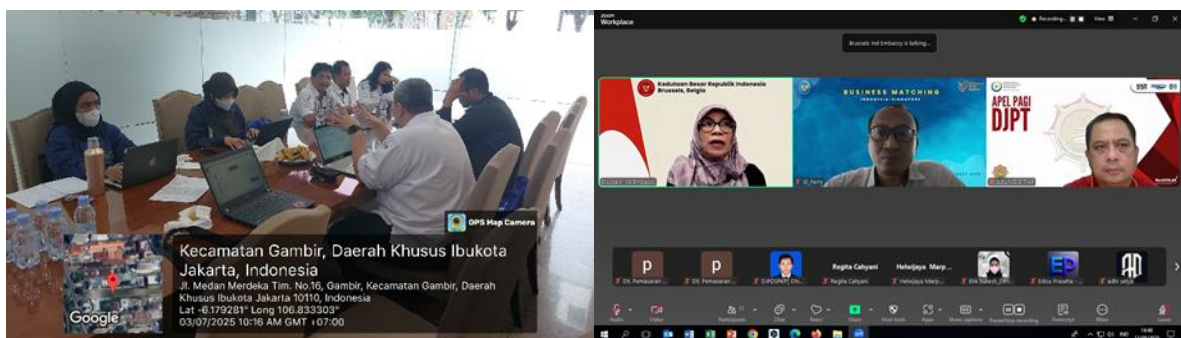
Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri melalui Kertas Posisi Runding. Dalam rangka penguatan ekspor produk perikanan Indonesia Ditjen PDSPKP telah melaksanakan rapat, antara lain:

- 1) Rapat pembahasan substansi permen KP SHTI

Ditjen PDSPKP melalui Direktorat Pemasaran telah melakukan serangkaian rapat pembahasan substansi permen KP SHTI tanggal 3 Juli, 13 Agustus, 19 Agustus. Selain itu, Direktorat Pemasaran telah menyampaikan nota dinas ke Dirjen PDSPKP tanggal 4 September 2025 terkait dengan Pemindahan Kewenangan Penerbitan *Processing Statement* dalam Persyaratan Ekspor ke Uni Eropa. Dalam perkembangan pembahasan substansi skema SHTI pada PerMenKP No. 10 Tahun 2021, Ditjen PT mengusulkan agar dokumen Processing Statement (Pernyataan Pengolahan) diterbitkan oleh Ditjen PDS karena Ditjen PT tidak memiliki kewenangan terkait dokumen tersebut. Hal ini ditegaskan kembali oleh wakil Ditjen PT pada rapat tanggal 14 Agustus 2025. Substansi Revisi PerMenKP KP No. 10 Tahun 2021 ditargetkan selesai pada September 2025. Sehubungan hal tersebut, Direktorat Pemasaran menyampaikan beberapa usulan opsi kebijakan, yaitu:

1. Opsi 1: Kewenangan penerbitan Pernyataan Pengolahan tetap di Ditjen PT
2. Opsi 2: Kewenangan penerbitan Penerbitan Pengolahan dipindahkan ke Ditjen PDSPKP dengan masa transisi
3. Opsi 3: Pembentukan UPT Ditjen PDSPKP
4. Opsi 4: Penunjukan Unit Lain sebagai Pelaksana Tugas



Gambar 10. Rapat pembahasan substansi permen KP SHTI

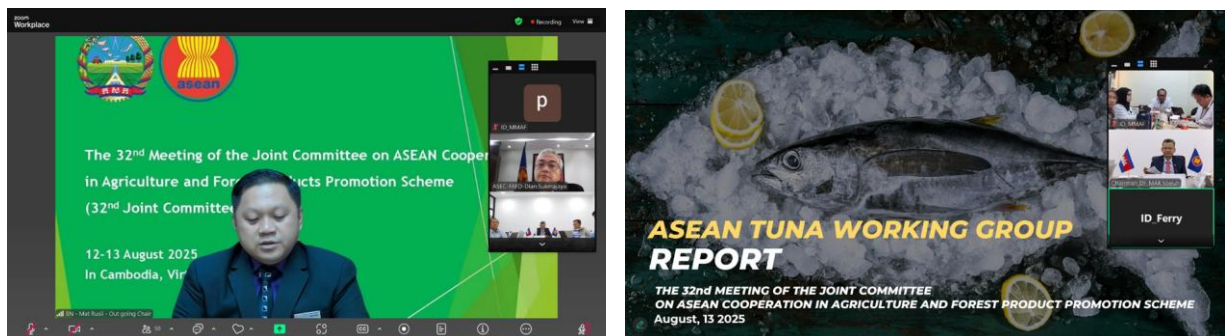
- 2) Perkembangan penanganan Pengenaan Tarif Resiprokal AS terhadap Sektor Perikanan Indonesia

Direktorat Jenderal PDSPKP melalui Direktorat Pemasaran telah menyelenggarakan serangkaian rapat penanganan pengenaan tarif

resiprokal pada tanggal 28 dan 30 Juli. Pada 15 Juli 2025, Presiden Donald Trump telah mengumumkan melalui media sosial bahwa AS dan Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengenakan TR sebesar 19% terhadap produk Indonesia yang diekspor ke AS, dan mengenakan Tarif Bea Masuk (TBM) 0% untuk produk AS ke Indonesia. TR ini turun 13% dari tarif sebelumnya yaitu 32 %. Kesepakatan TR ini merupakan hasil negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sejak bulan April sampai dengan Juli 2025. Dalam kesepakatan ini, sekurang kurangnya Indonesia berkomitmen untuk melakukan pembelian produk AS sebesar USD 34 Milyar dengan rincian berupa sektor energi sebesar USD 15 milyar, 50 pesawat jet jenis Boeing senilai USD 14,4 Milyar, dan produk pertanian senilai USD 4,5 milyar.

3) ASEAN Tuna Working Group ke-32

Ditjen PDSKP yang diwakili Direktorat Pemasaran telah mengikuti *the 32nd Meeting of the Joint Committee on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme* yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Pemasaran sebagai lead dari ASEAN Tuna Working Group (ATWG) menyampaikan mengenai perkembangan ATWG.

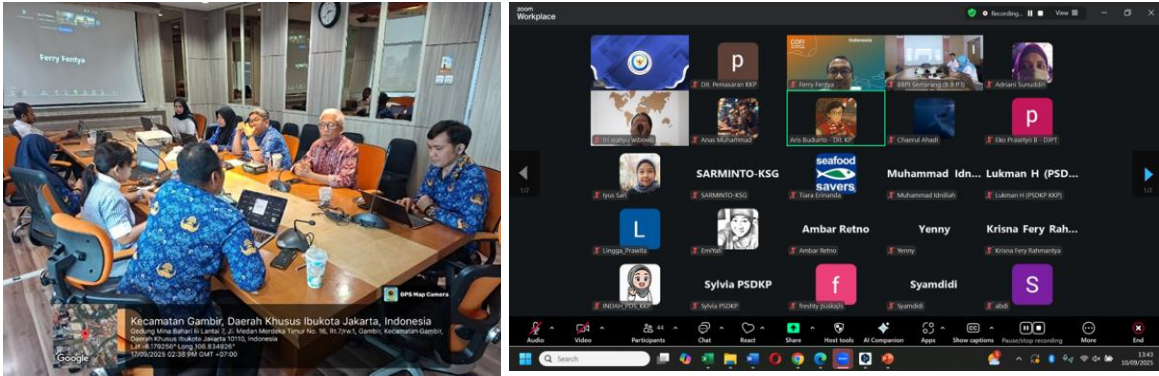


Gambar 11. Rapat ASEAN TUNA Working Group ke-32

4) Perkembangan Pemenuhan Persyaratan Ekspor ke pasar AS terkait *Marine Mammals Protection Act* (MMPA)

Ditjen PDSPKP melalui Direktorat Pemasaran telah menyelenggarakan serangkaian rapat dan sosialisasi terkait dengan hasil hasil penilaian AS atas pengajuan *comparability finding* Indonesia terkait Ketentuan U.S. *Marine Mammals Protection Act* (MMPA) yang dilaksanakan pada tanggal 10, 12, 17, dan 19 September 2025. Pada 2 September 2025, NOAA mengumumkan hasil *comparability finding* secara resmi dalam Federal Register (90 FR 42395) yang mencakup sekitar 2.500 perikanan dari 135 negara. Berdasarkan hasil revidasi atas pengajuan *comparability finding* Indonesia, dari 33 perikanan yang diajukan, sebanyak 28 perikanan diterima pengajuannya (dinyatakan efektifnya setara dengan aturan AS). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2. Sebanyak 5 perikanan ditolak permohonan *comparability finding*-nya. Hasil *comparability finding* berlaku selama 4 tahun sampai dengan 31 Desember 2029.

Ikan dan produk perikanan yang tidak mendapatkan *comparability finding*, akan dilarang masuk ke Amerika Serikat mulai 1 Januari 2026. 2. Untuk membedakan produk yang masuk ke pasar AS bukan berasal dari perikanan yang ditolak *comparability finding*-nya, AS mensyaratkan Certificate of Admissibility (COA). COA berisi informasi cara dan lokasi mendapatkan ikannya, serta harus disahkan oleh otoritas kompeten yang ditunjuk oleh negara pengekspor. Selanjutnya NOAA akan meminta daftar otoritas yang memvalidasi COA untuk disampaikan kepada Bea Cukai AS.



Gambar 12. Perkembangan Pemenuhan Persyaratan Ekspor ke pasar AS terkait Marine Mammals Protection Act (MMPA)

b. Pembahasan Analisis Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal terhadap Kinerja Impor Udang Beku Amerika Serikat

Direktorat Jenderal PDSPKP melalui Direktorat Pemasaran telah menyelenggarakan rapat pembahasan hasil Analisis Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal terhadap Kinerja Impor Udang Beku Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus 2025 di Ruang Rapat Investasi, Gedung Mina Bahari III, lantai 15. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Analisis Pasar Luar Negeri dan dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Kebijakan Strategis (Puskajis) Setjen KKP, Tim Kerja Akses Pasar dan Promosi Luar Negeri, serta para Analis Pasar Hasil Perikanan di lingkup Direktorat Pemasaran.

Rapat membahas hasil simulasi kuantitatif mengenai dampak kebijakan tarif resiprokal terhadap kinerja impor udang beku di AS dengan menggunakan metode *Linear Approximation of the Almost Ideal Demand System (LA/AIDS)* yang dipadukan dengan *Seemingly Unrelated Regression (SUR)*. Data yang digunakan bersumber dari UN Comtrade periode 1994–2024. Analisis ini dilakukan untuk memahami keterkaitan harga antar negara pemasok utama, yaitu India, Indonesia, Ekuador, dan Vietnam, serta menilai dampak perubahan harga terhadap pangsa pasar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa model LA/AIDS memiliki tingkat akurasi tinggi (R^2 0,903) dan menggambarkan hubungan substitusi yang kuat antara India–Indonesia–Vietnam, serta hubungan komplementer antara Indonesia dan Ekuador. Analisis elastisitas menunjukkan bahwa permintaan udang India sangat sensitif terhadap harga, sementara udang Indonesia relatif stabil. Simulasi kebijakan tarif memperkirakan bahwa kenaikan harga

udang India sebesar 50% dapat menurunkan impornya hingga 50,28%, dan membuka peluang peningkatan ekspor udang Indonesia ke AS hingga 47,18%.

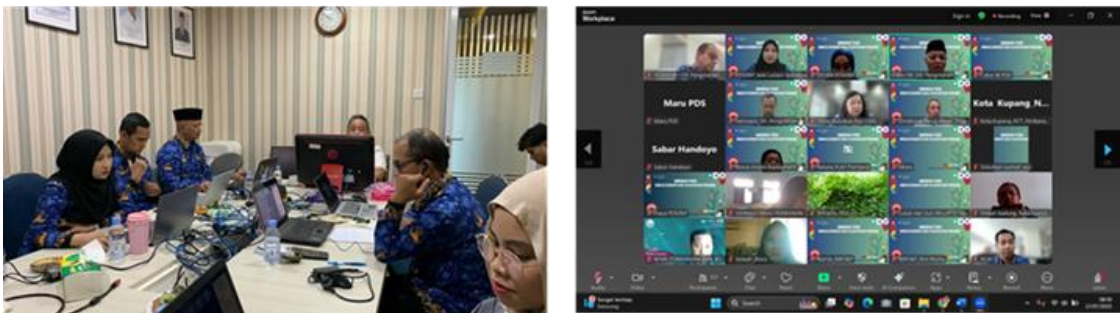
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan uji coba model dengan data bulanan terkini, penyusunan alur kerja (workflow) dalam aplikasi Knime, serta penyusunan rekomendasi kebijakan bersama Pusat Kebijakan Strategis untuk mendukung analisis dampak tarif resiprokal terhadap ekspor udang Indonesia.



Gambar 13. Pembahasan Analisis Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Terhadap Kinerja Impor Udang Beku Amerika Serikat

- b. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP. Persentase rancangan SNI produk perikanan yang memenuhi tahapan perumusan SNI adalah capaian perumusan SNI dibandingkan dengan keseluruhan tahapan perumusan SNI pada tahun berjalan. Tahapan perumusan Rancangan SNI produk perikanan meliputi RSNI1, RSNI2, RSNI3, penyampaian RSNI ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu:
- 1) Bimbingan Teknis Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada 17 Juli 2025. Peserta kegiatan ini mencakup Dinas Kelautan dan Perikanan dari berbagai daerah, perwakilan Ditjen PDSPKP, dan Tim Ahli Indikasi Geografis. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kriteria indikasi geografis, termasuk karakteristik, reputasi, kualitas, batas wilayah, proses produksinya, dan faktor lingkungan. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan identifikasi hasil kelautan dan perikanan yang potensial untuk didaftarkan indikasi geografis. Materi yang dibahas meliputi definisi dan manfaat indikasi geografis, dasar hukum, tahapan identifikasi, serta dokumen deskripsi yang menjelaskan karakteristik dan pengaruh faktor geografis. Kesimpulan dari kegiatan ini mencakup pembentukan tim pembinaan indikasi geografis, inventarisasi data hasil kelautan dan perikanan yang potensial untuk pendaftaran, pelaksanaan FGD untuk lokasi tertentu yang telah mengirimkan data, serta penyempurnaan peraturan tentang pelaksanaan indikasi geografis.



Gambar 14. Bimbingan Teknis Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

2) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pelaksanaan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

Rapat dilaksanakan secara daring pada 18 Juli 2025. Rapat dihadiri oleh Bapak Abdul Rokhman dan tim dari Ditjen PDSPKP. Tujuan rapat adalah untuk membahas revisi draft peraturan. Beberapa perubahan penting meliputi penggantian istilah "pengembangan" menjadi "pelaksanaan," penambahan pendaftaran internasional sebagai bagian pemanfaatan, dan penghapusan Bab II. Pasal 5 dan 6 membahas

inventarisasi produk dan kelembagaan masyarakat. Penelitian terkait faktor geografis menjadi bagian dari pemetaan. Pendaftaran dilakukan secara online dengan pendampingan literasi digital. Kesimpulan rapat adalah penyempurnaan draft dan penyusunan SK Tim Pembinaan. Rapat tindak lanjut dijadwalkan pada 21 Juli 2025 untuk finalisasi dan pengiriman draft ke tim kerja hukum.

3) Rapat Kaji Ulang SNI Produk Perikanan

Kegiatan dilaksanakan secara online pada 31 Juli 2025, dihadiri oleh anggota Komtek, Konseptor, Sekretariat komtek, serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal – BSN. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memelihara standar sesuai dengan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia. Rapat menghasilkan 8 rekomendasi SNI untuk revisi terkait produk perikanan, seperti SNI 4110:2020 Ikan Beku dan SNI 8606:2020 Filet Patin beku, serta 11 rekomendasi SNI untuk penetapan kembali, termasuk SNI 2354-22:2020 Cara uji kimia dan SNI 2332-13:2020 Cara uji mikrobiologi. Kesimpulan dari rapat adalah pengajuan 8 SNI rekomendasi revisi dan 11 SNI rekomendasi tetap untuk penetapan kembali.

4) Pemantauan Penerapan dan Kaji Ulang SNI di Kab. Bekasi

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2025 dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP. Tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, dan identifikasi penerapan SNI.

5) Koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UPI Skala Mikro Kecil Produk Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025, rapat dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Lembaga terkait. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyelaraskan program dan kebijakan agar pelaku usaha pengolahan ikan mikro kecil lebih mudah mendapatkan sertifikat halal, yang saat ini hanya sebagian kecil dari

76.318 UPI yang ada. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjelaskan bahwa Sertifikat Halal penting untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai produk halal. Usulan dari rapat mencakup Pembina Mutu sebagai pendamping halal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pelatihan mengenai kebijakan halal, pendaftaran pendamping halal, dan integrasi data UMKM. Penting untuk membuat draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PDSPKP dan BPJPH serta mengidentifikasi sumber anggaran untuk kegiatan pendampingan. Kesimpulannya, perlu ada koordinasi lanjutan dan penyusunan draf PKS.

- 6) Webinar Sosialisasi Halal dengan tema Optimalisasi Pendampingan dalam mendukung Kebijakan Sertifikasi Halal

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025 secara *hybrid*, dihadiri oleh 645 peserta dari berbagai lembaga terkait di seluruh Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang pendampingan sertifikasi halal untuk produk kelautan dan perikanan, khususnya untuk UMKM unit pengolah ikan. Webinar ini merupakan kolaborasi antara Ditjen PDSPKP dan BPJPH untuk mempercepat sertifikasi halal.

- 7) Melakukan Pembahasan potensi indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 secara daring. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta Dinas Perikanan dari beberapa kabupaten. Tujuan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi potensi indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan di provinsi tersebut.

- 8) Rapat Konfirmasi Dokumen RSNI Pedoman Pengujian Sensori pada Hasil Perikanan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 secara daring, dihadiri oleh perwakilan dari BSN dan konseptor dari berbagai institusi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memverifikasi draf akhir RSNI Pedoman pengujian sensori sebelum penetapan. Dalam

rapat, dibahas perbaikan redaksional dan akan ada pengiriman draf kembali pada 26 September 2025.

9) Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Cara Produksi Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 secara *hybrid*. Peserta rapat termasuk Direktur Sumber Daya Kelautan, anggota Komtek 65-05, dan perwakilan dari BSN. Tujuannya adalah membahas RSNI1. Pembahasan meliputi istilah, sistematika, sarana produksi, higiene pekerja, kompetensi, dan diagram alir. Kesimpulannya, RSNI0 disetujui menjadi RSNI1 dan konseptor akan memperbaiki konsep sesuai masukan untuk rapat RSNI2.

c. Pembinaan Industri Pengolahan Produk KP. Pembinaan Unit Pengolahan Produk KP menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP dilakukan melalui sosialisasi, bimtek, dan atau pembinaan lapangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau manual HACCP dan/atau laporan pembinaan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu:

1) Training Audit Internal *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP)

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2025 secara *hybrid*. Kegiatan diikuti oleh 34 peserta dari Pembina Mutu Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Tujuan pelaksanaan pelatihan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis peserta tentang layanan audit mutu. Pelatihan dibuka oleh Kepala Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan, dihadiri oleh perwakilan *United nations Industrial Development Organization* (UNIDO) dan *Global Quality and Standards Programme* (GQSP) Indonesia, serta Direktur Pengolahan.



Gambar 15. Training Audit Internal Hazard Analysis and Critical Control Points

2) Training Pembina Mutu *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)

Kegiatan pelatihan diadakan secara hybrid pada 30 dan 31 Juli 2025. Peserta pelatihan terdiri dari 25 calon Pembina Mutu HACCP, 136 Pembina Mutu Daerah, serta perwakilan dari UNIDO dan GQSP Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung visi Presiden dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan.



Gambar 16. Training Pembina Mutu Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

3) Pelaksanaan Verifikasi *Quality Management System* (QMS)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 di Ruang Rapat Direktorat Pengolahan. Kegiatan ini dihadiri oleh empat (4) anggota Tim Pusat Manajemen Mutu sebagai tim verifikator. Tujuan verifikasi adalah untuk menilai penerapan QMS dalam pembinaan oleh Direktorat Pengolahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hasil verifikasi menunjukkan nilai 91,67, dengan pembinaan

SKP dan HACCP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit kerja sedang menyesuaikan mekanisme pembinaan berdasarkan PP 28/2025.

4) *Sharing Session* Kegiatan Sebagai Observer Inspeksi UPI

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025 melalui zoom dan dihadiri oleh Pembina Mutu dari Direktorat Pengolahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamati proses inspeksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pembina Mutu diharapkan memahami regulasi dan teknik inspeksi lebih baik lagi di masa depan, dan dapat dilibatkan dalam proses audit untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini, dan pembina mendapat pengetahuan berharga.

d. Pelaksanaan Promosi Usaha dan Investasi KP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan III antara lain Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Tual melalui media sosial.

Kota Tual dikenal memiliki berbagai jenis ikan, seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, dan ikan-ikan karang lainnya. Selain itu, sumber daya perikanan seperti udang, kepiting, dan rumput laut juga menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan. Potensi tersebut tentunya menjadi peluang untuk berinvestasi pada industri pengolahan yang terintegrasi dengan usaha penangkapan sehingga menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan bernilai tambah tinggi, serta mampu menembus pasar global. Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Tual ini merupakan kegiatan mendukung kebijakan KKP dalam program Penangkapan Ikan Terukur di Zona 3. Peluang investasi yang ditawarkan tersebut meliputi industri pembekuan ikan, tuna loin, pengalengan, hidrolisat protein ikan (HPI), kerapu hidup, dan pabrik es.

e. Pembangunan Kawasan Hilirisasi KP

Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan merupakan kawasan pemusatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi secara sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan

dan pemasaran dalam rangka hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Pada Triwulan III tahun 2025, Ditjen PDSPKP melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha melanjutkan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan. Judul rancangan Rancangan peraturan tersebut yang disepakati yaitu Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan.

Mengacu pada PP 20 Tahun 2024 tentang perwilayahan industri, Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan diharuskan menjadi kawasan industri dimana pelaku usaha KP didalamnya memiliki izin usaha industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlokasi di kawasan peruntukan industri. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Kawasan Industri Tematik Tertentu yang terdiri dari kawasan industri tematik hasil tembakau, hasil kelautan dan perikanan, tekstil dan pakain jadi serta digital.

Direktorat Pemberdayaan Usaha tengah melakukan reformulasi ulang rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi KKP dalam pengelolaan kawasan industri tematik tertentu. Selain itu Direktorat Pemberdayaan Usaha juga melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rencana program Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan serta sinergitas kegiatan hilirisasi.

f. Pembinaan Pelaku Usaha dalam rangka Penguatan Sistem Logistik dilaksanakan melalui kegiatan

1) Koordinasi persiapan pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) kepada pelaku usaha distribusi ikan di Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan diselenggarakan secara daring tanggal 30 Juli 2025, dihadiri oleh Perwakilan PUPMHKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan dari BPPMHKP Palembang dan perwakilan Direktorat Logistik. Kegiatan ini dilatarbelakangi Persiapan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek penerapan CDIB kepada pelaku

usaha di Provinsi Sumatera Selatan pasca terbitnya PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- 2) Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) serta Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB utk pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* tanggal 7 Agustus 2025 dan dibuka oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh 63 peserta yang terdiri dari perwakilan: Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP, UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Yayasan WWF Indonesia, Pelaku Usaha Perikanan (Penyimpanan) yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pelaku usaha dalam menerapkan CDIB pada unit usahanya serta memberikan informasi penerapan CDIB pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pentingnya penerapan CDIB sesuai standar-standar CDIB (standar higienis; teknik penanganan; teknik pengemasan dan labeling; teknik distribusi; dan standar prasarana, sarana dan fasilitas) dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

- 3) Koordinasi Standar Pemasaran pada Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 18 September 2025 di RR. Mimika GMB 3 lantai 12. Rapat dihadiri oleh Pembina Mutu dan APHP Ahli Utama, perwakilan Biro Hukum KKP, BPPMHKP, Pusat Mutu Pascapanen, dan Setditjen PDSPKP. Tujuan kegiatan ini membahas standar pemasaran pada penerapan CDIB yang akan diusulkan dalam rancangan Permen KP turunan PP No. 28 Tahun 2025 (revisi permen KP no. 10 tahun 2021).

Latar belakang kegiatan adalah telah diundangkan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yg mengamatkan bahwa PBUMKU SPDI mencakup KBLI Pemasaran (46206, 46324, 47215, dan 47753) sehingga pelaku usaha pemasaran perlu menerapkan CDIB, dan pada Permen KP No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan yang menyebutkan bahwa standar pemasaran akan diatur pada peraturan tersendiri. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan terkait regulasi tersebut. Sehingga belum ada pedoman bagi pelaku usaha di bidang pemasaran dalam menjaga mutu dan keamanan pada kegiatan pemasaran hasil perikanan.

g. Implementasi Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) melalui kegiatan diantaranya:

1) Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kegiatan dihadiri 6 perusahaan yaitu Perwakilan CV. Adi Jaya Mandiri, PT. Alugoro Sakti Perkasa, PT. Chelsea Jaya Samudera, PT. Kongkie Malindo Jaya, PT. Bagan Sukses Mandiri dan PT. Cakrawala Mitra Bahari. pada tanggal 15 Juli 2025 dihadiri oleh Perwakilan PT. Harta Samudera, PT. Benteng Laut Sejahtera, PT. Nutrindo Freshfood Internasional, PT. Samudera Ulam Nusantara, PT. Sahabat Laut Lestasi dan PT. Dua Empat Tujuh. Tanggal 16 Juli 2025 dihadiri Perwakilan CV. Nogo Segoro, Koperasi Nelayan Putra Lautan, PT. Komiditi Nusantara Sejahtera, PT. Natuna Fish Building, PT. Golden Cup Seafood dan PT. Putri Indah, PT. Bonanza Pratama Abadi, CV. Pesona Mandiri, dan CV. Karya Indah.

Tujuan kegiatan adalah memberikan bimbingan tata cara akses aplikasi STELINA bagi registrasi maupun input data ketertelusuran serta mengetahui kendala pelaku usaha dalam akses aplikasi STELINA serta dilatar belakangi oleh implementasi STELINA secara mandatory berdasarkan PermenKP 32 Tahun 2024 bagi pelaku usaha di rantai pasok.

Bimtek ini memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait dengan menu utama aplikasi STELINA yang terdiri dari pelaku usaha, inventori stok, laporan, direktori dan transaksi. Pelaku usaha juga diberikan pelatihan mengenai cara yang tepat dalam mengisi data profil usaha, termasuk cara menambahkan informasi yang diperlukan, mengedit data untuk memperbaiki kesalahan atau memperbarui informasi yang sudah tidak relevan, serta menyusun direktori pemasok (supplier), pembeli (buyer), dan produk. Selain itu, pelaku usaha juga diajarkan pemanfaatan fitur unggah (upload) dalam sistem.

2) Rencana Kerjasama Tuna Konsorsium dalam rangka Pengembangan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) menuju Standar GDST

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Juli 2025 secara luring di Ruang Rapat Direktur Logistik, GMB 3 Lt 12. Tuna Konsorsium menyampaikan bahwa terkait dengan *traceability* saat ini proporsinya hanya 1/20 dari action plans. Namun demikian, Tuna Konsorsium berkomitmen untuk mensupport STELINA khususnya dalam menuju Standar GDST. Tuna Konsorsium dapat memberikan dukungan berupa menghadirkan narasumber teknis

Rencana Kerjasama dan sebagai langkah awal, akan dijadwalkan *Workshop Gap Analysis* STELINA Menuju Standar GDST pada 12-14 Agustus 2025, di RR Arwana, GMB 2 Lt 14 KKP. Workshop dan akan mengundang PT Solusi 247 sebagai pemberi materi untuk transfer *knowledge* sistem aplikasi STELINA serta Pusdatin sebagai rencana tim yang membantu pengembangan selanjutnya, AP2HI untuk menceritakan pengalaman lolos standar GDST, dan SLL dan MDPI sebagai member Tuna Konsorsium.

Selanjutnya koordinasi persiapan *capability test* standar GDST diharapkan dapat dilakukan setiap 3 minggu sekali sampai STELINA siap untuk dilakukan *capabiity test* dan lolos GDST pada bulan Desember 2025.

3) Workshop GAP Assessment STELINA dengan Standar Global

Kegiatan dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh 35 orang peserta yang berasal dari perwakilan Pusdatin Sekjen KKP, Dit. Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap, Tim Kerja lingkup Dit. Logistik Ditjen PDSPKP, *Executive Director of Global Dialogue on Seafood Traceability* - Mr. Huw Thomas, perwakilan Asosiasi dan Mitra (AP2HI, Tuna Concoortium, dan MDPI) serta penyedia provider Traceability : PT Dua Empat Tujuh, PT. Sahabat Laut Lestari, Bit House dan Pasar MIKRO. Workshop ini bertujuan untuk transfer pengetahuan aplikasi STELINA, berbagi informasi standar sistem elektronik dan interoperabilitas, mempelajari penerapan dasar GDST, mengidentifikasi kesenjangan STELINA terhadap standar GDST, menyusun rencana aksi harmonisasi data, serta mendorong kolaborasi multisektor.



Gambar 17. Workshop GAP Assessment STELINA dengan Standar Global

h. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok melalui kegiatan lingkup KKP.

1) Menghadiri FGD Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cadangan pangan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.

Kegiatan Rapat FGD Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cadangan pangan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal, yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Harmoni Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta Pusat. Diselenggarakan pada tanggal, 03 Juli 2025 dilaksanakan secara luring dan daring. Dipimpin oleh Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan, Kemenko Perekonomian dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, Badan Pangan Nasional, Kantor Staf Presiden, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serang, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, Pelaku Usaha dan UMKM, ID FOOD, Bulog, PT. Berdikari, PT PPI.

Tujuan kegiatan ini Membahas strategi kebijakan dan implementasi pengembangan cadangan pangan pemerintah dan daerah, Mengidentifikasi tantangan dan peluang optimalisasi sumber pangan local, Menyelaraskan pelaksanaan program MBG dengan penguatan cadangan pangan dan Mendapatkan masukan dan insight dari para stakeholder lintas instansi.

Percepatan penganekaragaman pangan sesuai Undang- Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pemanfaatan Potensi Sumber Daya dan Kearifan Lokal dilaksanakan melalui 8 strategi: dukungan kebijakan/regulasi, produksi dan konsumsi, pemanfaatan lahan, industri pangan lokal, jangkauan distribusi dan pemasaran, pangan B2SA, teknologi dan sistem insentif dan penguatan kelembagaan ekonomi.s

Tantangan utama peningkatan cadangan pangan berbasis sumber daya lokal: keterbatasan infrastruktur penyimpanan, infrastruktur tidak merata, minimnya teknologi pasca panen, ketergantungan pada komoditas tertentu, alih fungsi lahan dan perubahan iklim, kurangnya insentif ekonomi.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya sebesar Rp11.902.950.000,- sampai dengan periode triwulan III tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp1.171.000.000,- atau setara dengan 13% .

C. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri merupakan total nilai yang dihasilkan dari serapan produk perikanan dalam rumah tangga nasional. Penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik yang diperoleh 1 (satu) tahun setelah tahun berjalan, sehingga capaian yang dihasilkan merupakan angka prognosa.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW I 2025	TW III 2025	TW II 2025			TW III 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)
Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	-	-	-	310,51	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp310,51 triliun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Perluasan Safari Gemarikan adalah Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya

kandungan gizi ikan bagi kesehatan, meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, mendukung program prioritas nasional percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, mempromosikan produk perikanan sebagai makanan kaya gizi dan protein serta menyerap produksi ikan/olahan ikan pada UMKM setempat serta pemenuhan gizi masyarakat. Pada kegiatan ini juga dilakukan distribusi Paket Gemarikan dengan tujuan untuk mengenalkan ragam produk olahan ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam tingkatan semua usia dan mengenalkan produk UMKM dan menjadi sumber pendapatan untuk UMKM setempat. Telah dilaksanakannya kegiatan promosi kampanye Gemarikan di beberapa daerah pada Triwulan III Tahun 2025, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Batam, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul.



Gambar 18. Kegiatan Safari Gemarikan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Polewali Mandar

- b. Penyediaan Peralatan Pemasaran. Peralatan pemasaran merupakan Bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat dalam hal ini koperasi/kelompok perikanan berupa *cool box* guna mendukung distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan III yaitu telah dilaksanakan pembahasan Penyaluran Peralatan Pemasaran Coolbox Tahun 2025 pada tanggal 4 September 2025 untuk

mempercepat koordinasi proposal yang akan di serahkan dan menetapkan lokasi distribusi yang beririsan pada sasaran kebijakan Pemerintah Pusat terkait Program Kampung Desa Merah Putih. Pada Tanggal 11 September 2025 telah melaksanakan identifikasi penerima bantuan pemerintah berupa *Ice Flake* Mesin di Pasar Bringharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta

c. Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan. Penyusunan profil pasar dalam negeri hasil kelautan perikanan dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari kegiatan penghitungan angka konsumsi ikan, penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri, serta penghitungan data dan informasi lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2025, yaitu:

- 1) Penyusunan buku Pedoman Penghitungan Angka Konsumsi Ikan. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memilih sumber data dan metode penghitungan angka konsumsi ikan (AKI) tahun 2024.
- 2) Pelaksanaan *Workshop* Penghitungan AKI Tahun 2024 pada tanggal 22-24 April 2025 secara *hybrid*. *Workshop* dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Akses Pasar Dalam Negeri, serta dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 38 Provinsi, perwakilan dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan, perwakilan eselon II lingkup PDS, serta perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Pemasaran. *Workshop* ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan metode penghitungan AKI Tahun 2024, serta sosialisasi metode penghitungan AKI Tertimbang yang akan diterapkan dalam penghitungan AKI Tahun 2025. Pada kegiatan *workshop* dilakukan penghitungan konsumsi ikan di dalam rumah tangga berdasarkan data Susenas BPS. Selanjutnya, DKP Provinsi melakukan penghitungan konsumsi ikan di luar rumah tangga dan konsumsi ikan

tidak tercatat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta dientri pada *Tools Neng Geulis* sehingga diperoleh nilai angka konsumsi ikan total di



Gambar 19. Workshop Penghitungan AKI Tahun 2024

d. Kurasi Produk Kelautan Perikanan. Kegiatan Kurasi Produk Perikanan TW III Tahun 2025 dilaksanakan pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bengkulu, Lampung, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Yogyakarta. Jumlah UMKM yang telah dikurasi pada TW III Tahun 2025 yaitu sebanyak 153 UMKM. Sebagai gambaran pelaksanaan kurasi, UMKM dan Dinas mendengarkan paparan terkait Kurasi Produk Kelautan dan Perikanan dalam bentuk Sosialisasi. Kurasi Produk UMKM adalah proses menjaga nilai serta mengelola produk UMKM untuk dapat dikembangkan atau dilestarikan dikemudian hari. Dalam mengolah produk UMKM agar memiliki sebuah nilai, diperlukan sebuah standar yang sama satu dengan yang lainnya. Hal ini memudahkan dalam menyeleksi sebuah produk.

e. Penyusunan Profil Industri Pengolahan Hasil Perikanan. Produksi Olahan KP adalah volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan skala mikro, kecil (MK) dan skala menengah besar (MB). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2025, yaitu:

- 1) Persiapan Pendataan Utilitas dan Volume Produk UPI Menengah Besar 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2025 di RR. Pembinaan Mutu Direktorat Pengolahan. Kegiatan dihadiri oleh, Ketua Tim Kerja PUP2MB dan perwakilan dari Badan Karantina Indonesia serta

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyepakati data yang telah dikirimkan oleh Badan Pengendalian dan mempersiapkan pendataan. Data untuk perhitungan VPO dan Utilitas diperoleh dari BKI dan BPPMHKP. Beberapa tantangan terkait pencatatan dan perbedaan data turut dibahas. Pentingnya koordinasi dengan badan mutu untuk pendataan kapasitas UPI MB juga ditekankan, agar dapat dikolaborasikan saat pengajuan izin. Pendataan UPI MB akan dilakukan melalui self report dan kolaborasi webinar.

2) Sosialisasi Pendataan Volume Produk Olahan UPI Mikro-Kecil pada Kegiatan Workshop satu data bidang PDSPKP tahun 2025

Kegiatan berlangsung dari tanggal 8-10 Juli 2025 secara *hybrid*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, validator pusat, validator provinsi, validator kab/kota, dan enumerator dari Dinas KP dan Penyuluh KP. Tujuan kegiatan adalah pelatihan untuk validator dan enumerator mengenai pendataan bidang PDSPKP menggunakan aplikasi Portaldata KKP. Pendataan ini mencakup kusuka pengolah dan pemasar, Volume Produk Olahan (VPO), gudang ikan, stok ikan, dan harga ikan eceran. Petugas Pendataan akan melakukan input dan validasi data, serta memutakhirkan data kusuka. Kerangka sampel untuk pendataan VPO ditentukan oleh validator pusat dan provinsi. Database gudang beku dapat diakses validator daerah dan diupdate oleh enumerator. Uji coba aplikasi Portaldata KKP dapat dilakukan hingga 21 Juli 2025. Pendataan harga ikan dilakukan melalui pemilihan jenis ikan, pasar, dan pedagang, dengan target 5 jenis ikan per bulan. Setelah 21 Juli 2025, petugas harus menginput data dari Januari hingga Juni 2025 secara berkala. Koordinasi aktif antara validator dan petugas pendataan sangat diperlukan.

3) Monitoring dan Updating Pendataan VPO Skala Mikro Kecil Tahun 2025 (Semester I tahun 2025)

Kegiatan dilaksanakan tanggal 25-30 September 2025, secara online. Peserta kegiatan termasuk perwakilan dari beberapa instansi dan petugas enumerator dari Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan monitoring dan updating data Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan, serta menyinkronkan dan mengidentifikasi kendala dalam pendataan. Pendataan dilakukan oleh petugas enumerator yang mengikuti pedoman resmi. Monitoring dibagi dalam empat wilayah provinsi, dengan tim yang terdiri dari validator dan enumerator. Namun, beberapa provinsi belum mengirimkan dokumen dan melakukan validasi data. Kendala yang dihadapi termasuk pergantian petugas, data yang belum mutakhir, kendala sistem input data, serta efisiensi anggaran. Kesimpulannya, diperlukan koordinasi untuk mempercepat pengumpulan data, sosialisasi soal penginputan data, dan validasi nasional oleh Pusdatin KKP pada M-4 Oktober 2025.



Gambar 20. Monitoring dan Updating Pendataan VPO Skala Mikro Kecil Tahun 2025

f. Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP.

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem rantai dingin, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung pencapaian produksi olahan hasil kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku UMK Pengolahan, pada tahun 2025 Direktorat Pengolahan memfasilitasi pemberian Bantuan Pemerintah berupa chest freezer. Pada Triwulan III Tahun 2025 kegiatan pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan bantuan

pemerintah seperti kegiatan penyusunan dokumen pendukung dan koordinasi lintas unit kerja.

Sebagai upaya penyiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Pemerintah (BP) berupa Chest Freezer (CF) Tahun Anggaran 2025, Dit. Pengolahan telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendukung selama Triwulan III, yaitu :

- 1) Rapat Pembahasan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Chest Freezer Tahun 2025 pada tanggal 30 Juli 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas calon penerima bantuan agar sesuai dan siap secara teknis.
- 2) Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peralatan Pengolahan Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memperbarui kegiatan dan mengevaluasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah.
- 3) Rapat Persiapan Pengadaan Sarana Rantai Dingin Chest Freezer TA 2025 Tahap I dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mereview paket pengadaan chest freezer serta membahas teknis pengadaan melalui *e-purchasing*. Rencana pengadaan meliputi 19 unit *chest freezer* di 10 lokasi di enam provinsi.
- 4) Koordinasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kota Bogor pada 9 September 2025, Kabupaten Indramayu dan Cianjur pada 10 dan 11 September 2025, serta Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang pada 16 dan 17 September 2025. Peserta kegiatan ini termasuk tim dari Dit. Pengolahan, Dinas Perikanan setempat, penyuluh, dan calon penerima bantuan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memastikan kesesuaian data usulan dengan kondisi riil di lapangan, kelayakan calon penerima, dan dukungan pemerintah daerah untuk keberlanjutan pemanfaatan bantuan.

- 5) Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis Daerah untuk Penyaluran *Chest Freezer* Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 secara *hybrid*. Rapat dihadiri oleh tim teknis daerah penerima, dan Itjen IV. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan koordinasi teknis terkait penyaluran bantuan *chest freezer*. Pada 4 September 2025, Direktorat Pengolahan telah melakukan pengadaan 19 unit *chest freezer* untuk 10 kabupaten/kota yang akan disalurkan melalui Dinas setempat yang ditunjuk. Tim teknis memiliki tugas untuk mendampingi proses penyaluran, memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi
 - 6) Rapat Koordinasi dengan Dinas Kabuten/Kota Calon Lokasi Penerima Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II pada tanggal 24 September 2025, diadakan Rapat Koordinasi secara *hybrid* dengan Dinas Kabupaten/Kota calon lokasi penerima Bantuan Chest Freezer Tahun 2025 Tahap II. Pembahasan mencakup spesifikasi, mekanisme penyaluran, persyaratan administrasi, dan hasil verifikasi. Hasil verifikasi menunjukkan sekitar 80% dokumen administrasi sudah lengkap, namun perlu pembaruan beberapa dokumen. Penerima bantuan ditetapkan 58 kelompok dengan total 72 unit dari 95 usulan. Proses upload perbaikan dokumen diharapkan selesai pada 24 September. Dinas diminta untuk memperbarui data KUSUKA dan memastikan kelengkapan administrasi, serta validitas data penerima.
 - 7) Rapat Koordinasi Penetapan Calon Lokasi dan Persiapan Pengadaan Bantuan Chest Freezer Tahun 2025 Tahap II dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 secara luring. Peserta rapat terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi yang terkait. Tujuan rapat adalah untuk melanjutkan pembahasan dari rapat sebelumnya mengenai Dinas Kabupaten/Kota calon penerima bantuan.
- g. Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil KP. Pada Triwulan III tahun 2025
- Pada Triwulan III Tahun 2025 kegiatannya berupa kegiatan penyusunan dokumen pendukung dan koordinasi lintas unit kerja. Sebagai upaya percepatan dan penyiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan

Pemerintah (BP) berupa Peralatan Pengolahan (PP) Tahun Anggaran 2025, Dit. Pengolahan telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendukung selama Triwulan III, antara lain:

- 1) Rapat Pembahasan Paket dan Spesifikasi Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan TA 2025 dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan bantuan pemerintah peralatan pengolahan.



Gambar 21. Rapat Pembahasan Paket dan Spesifikasi Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan TA 2025

- 2) Rapat Finalisasi Revisi Petunjuk Teknis Peralatan Pengolahan TA 2025 dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk finalisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Tahun 2025.
- h. Pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi Produk Bernilai Tambah. Diversifikasi produk merupakan salah satu upaya untuk menambah nilai hasil perikanan sesuai yang diamanahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2025, yaitu:
- 1) Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Tempura Udang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 secara *online* melalui Zoom dan YouTube. Kegiatan ini diikuti oleh 278 peserta melalui Zoom dan 27 peserta melalui *livestream* YouTube dari 38 provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mendukung hilirisasi dan industrialisasi nilai tambah, serta memberikan

wawasan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk kelautan dan perikanan Indonesia.

- 2) Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Sirup Rumput Laut. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 secara *online*. Kegiatan ini diikuti oleh 471 peserta melalui Zoom dan 81 melalui YouTube dari 38 Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman tentang diversifikasi produk rumput laut, khususnya pengolahan menjadi sirup yang inovatif dan bernilai tinggi.
- 3) Ngolah Ikan Bersama Gen Z : Sambal Ikan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025 secara online melalui *Zoom Meeting* dan YouTube. Kegiatan ini diikuti oleh 667 peserta melalui *Zoom Meeting* dan 50 peserta melalui saluran YouTube dari 38 provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberi pemahaman kepada generasi Z tentang diversifikasi produk dari ikan, khususnya pengolahan Ikan Tuna menjadi sambal yang bernilai tinggi, serta mendorong kreativitas dari generasi Z.
- 4) Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Bakso Udang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 secara online. Kegiatan ini diikuti oleh 323 peserta melalui *Zoom Meeting* dan 186 melalui YouTube dari 38 provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi UMKM dalam mengolah udang menjadi bakso berkualitas tinggi dan bernilai jual.
- 5) Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Kamaboko. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025, secara online melalui *Zoom Meeting* dan *streaming* Youtube. Kegiatan ini diikuti oleh 547 peserta melalui Zoom dan 67 peserta melalui YouTube dari 38 provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pemahaman tentang diversifikasi produk berbasis surimi agar menciptakan produk inovatif dan bernilai jual tinggi.
- 6) Rapat Kolaborasi Penanganan dan Pengolahan Ikan Dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan dilaksanakan pada

tanggal 9 September 2025 melalui *Zoom Meeting*. Tujuan rapat adalah membahas rencana kolaborasi penanganan dan pengolahan ikan di Jakarta. Kolaborasi ini terdiri dari tiga kegiatan: pelatihan penanganan dan pengolahan ikan, lomba inovasi olahan berbasis ikan sarden untuk acara Makan Bersama Gratis (MBG), dan lomba video memasak berbasis ikan sarden. Pelatihan akan diikuti oleh 500-1000 peserta dari SPPG di seluruh Indonesia, berlangsung dari September hingga November 2025. Lomba inovasi akan melibatkan 20 peserta dari DKI Jakarta dan diadakan di dapur PT ABC Heinz pada Oktober 2025. Juri lomba terdiri dari KKP, BGN, dan Chef PT ABC Heinz.

- 7) Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : *Cookies* Rumput Laut. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2025 melalui *Zoom Meeting* dan Youtube. Kegiatan ini diikuti oleh 575 peserta melalui *Zoom Meeting* dan 49 peserta melalui Youtube dari 38 Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pemahaman teknis tentang diversifikasi produk berbasis rumput laut agar dapat menjadi produk inovatif yang bernilai tinggi.
- 8) Rapat Persiapan Pelatihan Penanganan dan Pengolahan Ikan Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025, melalui *Zoom Meeting*. Tujuan pelaksanaan rapat adalah untuk membahas persiapan pelatihan penanganan dan pengolahan ikan. Pelatihan akan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama diadakan pada bulan Oktober 2025, membahas pengenalan penanganan ikan segar dan praktik higienis secara online. Tahap kedua juga di bulan Oktober 2025, fokus pada standarisasi bahan baku dan teknik pengolahan ikan untuk menu berbasis tuna. Tahap ketiga digelar pada bulan November 2025 secara luring di PT ABC Heinz, membahas GMP SSOP, bahan tambahan pangan, dan penyimpanan ikan.
- 9) Webinar Mikroalga : Inovasi dan Ragam Pemanfaatan Spirulina. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 melalui *Zoom Meeting* dan YouTube. Kegiatan ini diikuti oleh 360 peserta melalui *Zoom*

Meeting dan 89 peserta melalui YouTube dari 38 Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong inovasi produk bernilai tambah, seperti makanan fungsional, suplemen, dan kosmetik, serta menjadi sarana pertukaran pengetahuan antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam industri mikroalga.

i. Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Pengadaan, Distribusi dan Penyimpanan. Beberapa kegiatan pendukungnya diantaranya:

- 1) Koordinasi Distribusi Hasil Perikanan Dengan Moda Transportasi Udara Untuk Tujuan Ekspor. Rapat dihadiri oleh GM. SBU Air Express IAS, Deputy Head of Commercial IAS, Perwakilan DKP Prov. Maluku, Pelaku Usaha PT Rajawali Laut Timur, serta Tim Kerja Lingkup Dit. Logistik.
- 2) Penataan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dengan Menggunakan Moda Transportasi Darat. Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Penataan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dengan Menggunakan moda Transportasi Darat di UKM Siomay Chipsy, dilaksanakan di Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilatar belakangi sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Layanan Distribusi Hasil Perikanan dengan menggunakan moda Transportasi Darat oleh Ekspedigin. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi layanan pengangkutan yang mendukung konektivitas dan penjaminan mutu produk di sepanjang rantai pasok.
- 3) Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu dan penandatanganan kesepakatan kemitraan. Dilaksanakan pada tanggal 6 September 2025 di kabupaten Subang dan Indramayu. Tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring adalah Pemantauan penerapan kelayakan gudang beku (sanitasi dan *higiene*), Mengetahui bisnis eksisting pemanfaatan gudang beku dan Mendorong terwujudnya kesepakatan bersama penyimpanan ikan di Gudang Beku Indramayu (pengelola gudang beku dan bakul).

Saat kunjungan dilaksanakan juga penandatanganan kerjasama antara Manajer Gudang Beku dengan 3 orang pedagang ikan yang secara

rutin menyimpan ikan di gudang beku. Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut diharapkan para pihak berkomitmen untuk menjaga mutu ikan yang disimpan dalam gudang, meningkatkan kepercayaan pemilik ikan terhadap keamanan ikan dan mutu ikan selama disimpan di gudang beku, dan meningkatkan kerja sama saling menguntungkan para pihak.

j. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas melalui kegiatan Pemutakhiran Data Rencana Kebutuhan Komoditas Perikanan Tahun 2025. Berdasarkan usulan perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan tahun 2025 yang disampaikan Pelaku Usaha melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) pada Sistem INSW, Direktorat Logistik - Ditjen PDSPKP melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik dan tim verifikasi yang terdiri dari perwakilan tim Direktorat Logistik, Anggota Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik.

k. Penyusunan profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP melalui kegiatan

- 1) Penyajian Informasi Gudang Beku Bantuan Pemerintah secara Digital dengan Barcode. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 secara daring melalui aplikasi *Google meet*. Tujuan rapat ini untuk memperbarui informasi mengenai gudang beku bantuan pemerintah yang akan disajikan secara digital melalui sistem barcode.

Penyajian data gudang beku (Cold Storage/CS) bantuan pemerintah (BP) melalui sistem barcode menjadi langkah strategis untuk menghadirkan informasi yang lebih mudah diakses, transparan, dan terintegrasi. Melalui barcode, setiap CS. BP dapat diberi identitas unik yang memudahkan proses pendataan, monitoring, serta evaluasi pemanfaatan fasilitas secara real-time, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Target awal pendataan barcode CS BP pada periode 2016–2024 ditetapkan sebanyak 88 cold storage, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai

distribusi, kondisi, serta tingkat kebermanfaatan aset. Sehingga digitalisasi data melalui barcode tidak hanya mempermudah pengelolaan administrasi, tetapi juga mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

- 2) Koordinasi Hasil *Cleaning* Database Sebaran Gudang Beku Nasional. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025. Tujuan rapat ini yaitu untuk melakukan koordinasi hasil *cleaning* database sebaran gudang beku nasional dengan tim data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP.
- 3) Pembahasan Visibilitas Peta Sebaran Cold Storage (CS). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025. Agenda pembahasan dalam rapat meliputi pembaruan database gudang beku nasional, proses pengajuan usulan via Satu Peta, tindak lanjut kontrol kualitas data, evaluasi sebaran gudang beku per provinsi, dan visibilitas profil sebaran gudang beku pada Portal data.

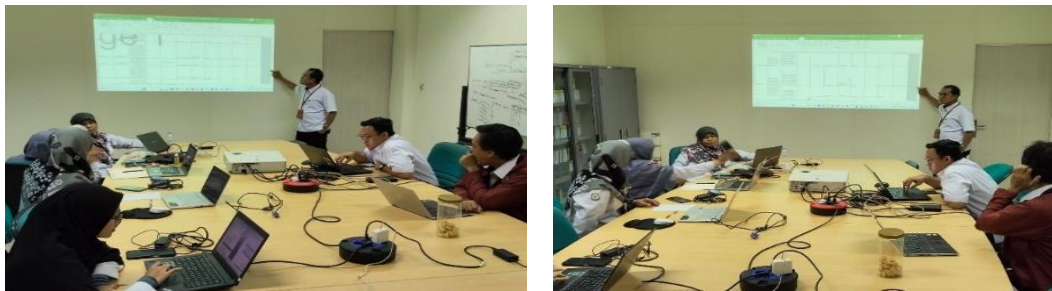
Pada rapat ini disepakati bahwa proses *updating* database telah selesai dengan data terbaru hingga Juli 2025. Kontrol kualitas masih berlangsung dan menjadi kunci agar data dapat tayang sesuai target akhir pada bulan Agustus 2025. Tindak lanjut rapat ini akan diadakan rapat lanjutan pada hari Kamis, 28 Agustus

- I. Penyiapan Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan.

Persentase bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis telah tercapai 80% pada periode triwulan 3. Terdapat 4 (empat) judul Bahan RSNI sudah sampai pada tahapan proses RSNI3, diantaranya (1) Revisi SNI 8646:2018 Kerupuk ikan, udang dan moluska Siap Makan, (2) Revisi SNI 7661:2019 Pempek, (3) Revisi SNI 7689: 2013 Agar-agar Kertas dan (4) Revisi SNI 2346:2015 Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan III diantaranya:

- 1) Verifikasi dokumen RSNI3, yaitu rancangan standar yang telah melalui pembahasan teknis dan konsensus internal.

- 2) Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen RSNI3 telah memenuhi persyaratan substansi teknis, administratif, dan kesesuaian dengan laporan pengendali mutu.
- 3) Identifikasi dan pengumpulan data produk dodol rumput laut yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RSNI0. Sampel produk dodol rumput laut berasal dari tiga produsen yaitu Phoenix Food Lombok, Sasak Maiq dan UD. Merpati Lombok.
- 4) Rapat identifikasi kluster SNI produk perluasan ruang lingkup layanan tanggal 21 Juli 2022. Berdasarkan hasil identifikasi, dapat dipertimbangkan untuk perluasan ruang lingkup LSPro-HP pada tahun 2026 berfokus pada subkategori 16. Dari 68 SNI (48 produk) yang memungkinkan sebanyak 21 SNI (19 produk) di luar ruang lingkup.



Gambar 22. Rapat identifikasi kluster perluasan ruang lingkup SNI produk

- 5) Rapat rencana perluasan ruang lingkup layanan SNI produk tahun 2026 yang dilaksanakan tanggal 22 Juli 2025. Kelompok subkategori 16 menjadi prioritas untuk dapat disediakan dalam perluasan lingkup layanan, dengan pendekatan dokumen sudah tersedia untuk produk sejenis. Pada rapat ini didapatkan informasi terkait UKM/UPI terutama binaan BBP3KP yang merupakan penerap inovasi dan tenant Invapro Kape yang berpotensi menjadi calon klien LS-Pro HP BBP3KP.
- 6) Focus Group Discussion (FGD) penyusunan lembar penilaian sensori produk dodol rumput laut dalam rangka penyusunan revisi SNI 7761:2013 tanggal 5 Agustus 2025 secara hybrid di ruang sensori laboratorium BBP3KP dan melalui aplikasi zoom meeting. FGD membahas reviu spesifikasi kenampakan dan bau setiap score nilai sesuai lampiran A SNI

7761:2013 dan menambahkan spesifikasi rasa dan tekstur pada lembar penilaian sensori.

- 7) Rapat tinjauan skema sertifikasi perluasan ruang lingkup LSPro-HP BBP3KP tanggal 28 Agustus 2025 secara hybrid di Ruang Rapat Laboratorium BBP3KP dan melalui aplikasi zoom meeting. Rencana perluasan ruang lingkup TA 2026 sebanyak 15 produk, dimana 14 produk termasuk dalam sub kelompok 16 dengan skema mengacu pada PBSN No. 5 Tahun 2024 dan tahapan kritis proses produksi sesuai Keputusan Kepala BSN No. 349 Tahun 2024 dan 1 produk termasuk dalam sub kelompok 15 dengan skema mengacu PBSN No. 4 Tahun 2024 dan tahapan kritis proses produksi sesuai format Keputusan Kepala BSN No. 350 Tahun 2024.
- 8) *In house training* bedah SNI produk perikanan tanggal 10–11 September 2025 di Ruang Rapat Surimi BBP3KP dan melalui aplikasi *zoom meeting*. Narasumber hari pertama adalah Dr. Achmad Purnomo yang merupakan dosen di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Materi yang diberikan diantaranya: 1) SNI 8813:2019 Lumatan ikan, 2) SNI 8440:2017 Stik kepiting analog (*imitation crab stick*), 3) SNI 7755:2013 Sosis ikan, 4) SNI 8643:2018 Chikuwa, 5) SNI 6163:2017 Udang berlapis tepung (*breaded*) beku, 6) SNI 9193:2023 Bandeng dalam kemasan kaleng, dan 7) SNI 8269:2016 Rendang ikan tuna. Narasumber pada hari kedua adalah Bapak Dr. Sunarya selaku tenaga ahli dari GQSP UNIDO Indonesia. Materi yang diberikan diantaranya: 1) SNI 7687:2013 Keripik belut, 2) SNI 8644:2018 Keripik ikan, 3) SNI 9013:2021 Keripik kulit ikan goreng, 4) SNI 9105:2022 Nori, 5) SNI 8645:2018 Dendeng ikan, 6) SNI 8376:2017 Ikan asin jambal roti, dan 7) SNI 9104:2022 Ikan, moluska, ekonodermata kering tawar.



Gambar 23. Inhouse training bedah SNI produk perikanan

- 9) Rapat tinjauan skema sertifikasi LSPro HP BBP3KP dilaksanakan tanggal 22 September 2025 secara hybrid di RR LSPro HP BBP3KP Jakarta dan melalui aplikasi *zoom meeting*. Tahun anggaran 2026, direncanakan penambahan ruang lingkup sertifikasi LSPro-HP sebanyak 15 produk. Dari 15 produk tersebut, 11 (sebelas) produk termasuk dalam sub kategori 16 dan akan menggunakan skema yang mengacu pada PBSN No. 5 Tahun 2024, 1 (satu) produk termasuk dalam sub kategori 15 dan akan menggunakan skema yang mengacu pada PBSN No. 4 Tahun 2024, dan 3 (tiga) produk termasuk dalam sub kategori 14 dan akan menggunakan skema mandiri LSPro HP BBP3KP.
 - 10) *In house training* bedah SNI produk perikanan tanggal 25 September 2025 secara *hybrid* di Ruang Arsip LSPro-HP BBP3KP dan melalui aplikasi *zoom meeting*. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personel LSPro-HP BBP3KP terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan.
- m. Penilaian Kesesuaian terhadap Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah
- Produk kelautan dan perikanan yang mendapatkan SPPT SNI dan/ atau Sertifikat Kesesuaian sampai dengan Triwulan III telah tercapai 68 produk. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian diatas, diantaranya:
- a) Kaji ulang permohonan dilakukan terhadap permohonan sertifikasi dari beberapa pemohon
 - b) Rapat tindak lanjut hasil rekomendasi rapat governing board tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 secara hybrid melalui *zoom meeting* dan luring di Ruang rapat Laboratorium BBP3KP. Rapat dilaksanakan

bersama Ibu Anna Maria selaku tim Governing Board dan perwakilan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I). Dari pertemuan ini LSPro-HP dan AP5I sepakat untuk menjalin kerja sama lebih intensif dalam bentuk sosialisasi, pendampingan teknis, serta pendekatan langsung kepada pelaku usaha, khususnya anggota AP5I yang memproduksi produk perikanan yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi LSPro-HP.

- c) *Focus group discussion* (FGD) optimalisasi layanan pengujian dan sertifikasi penilaian kesesuaian bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Rabu, 9 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Surimi, BBP3KP, Jakarta. Tujuan kegiatan untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas layanan laboratorium pengujian serta sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan. Kegiatan FGD menghadirkan dua narasumber dari BSN, yaitu Ibu Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si (Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi) yang membahas “Tata Cara Penambahan Ruang Lingkup dan Witness Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, Jasa (LSPr)”, serta Bapak Dr. Agustinus Praba Drijarkara, M.Eng (Direktur Akreditasi Laboratorium) yang memaparkan mengenai Akreditasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.



Gambar 24. Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Layanan Pengujian dan Sertifikasi Penilaian Kesesuaian

- d) *In house training refreshment* teknik sampling, metode pengujian pemeriksaan kaleng, berat bersih dan berat tuntas serta kepekatan saus tomat tanggal 22 Agustus 2025 secara hybrid, bertempat di Ruang Rapat Laboratorium dan juga melalui *zoom meeting*. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan meliputi:
- 1) Pengambilan Sampel Produk Hasil Kelautan dan Perikanan, disampaikan oleh Ibu Yuyun Sundari S.Farm.

- 2) SNI 01-2372.3:2006 Cara Uji Fisik - Penentuan kepekatan Saus Tomat dalam Produk Perikanan yang Dikemas dan SNI 2372.8:2024 Cara Uji Fisik - Penentuan Berat Bersih dan Berat Tuntas Produk Perikanan Sterilisasi Komersial, disampaikan oleh Ibu Rini Rosita, S.St.Pi.
 - 3) SNI 01-2372.4:2006 Cara Uji Fisik - Pemeriksaan Kemasan Kaleng Produk Perikanan, disampaikan oleh Ibu Gud Elyna S.Pi, M.Si.
- e) Surveilans Pertama PT Heinz ABC Indonesia tanggal 27-28 Agustus 2025 di Unit Pengolah Ikan (UPI) CV. Indojaya Pratama dan PT. Sari Laut Jaya Food Products di Banyuwangi, Jawa Timur yang merupakan *co-packer* (makloon) dari PT Heinz ABC Indonesia. Hasil evaluasi ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang perlu dilakukan tindakan perbaikan sebagai upaya pemenuhan surveilans pertama. Pengambilan contoh dilakukan terhadap produk merek ABC dengan varian saus tomat, saus extra pedas, dan saus chili, untuk semua varian dengan ukuran 155 g dan 425 g.



Gambar 25. Surveilans PT Heinz ABC Indonesia

- f) Rapat pembahasan surveilans dan resertifikasi klien SNI Sukarela LSPro-HP BBP3KP tanggal 29 Agustus 2025. Rapat dihadiri oleh personil dan klien SNI Sukarela LSPro-HP BBP3KP. Berdasarkan PBSN Nomor 5 Tahun 2024 pada Pasal 3, sertifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode luring atau daring. Klien LSPro-HP BBP3KP yang termasuk usaha mikro dan usaha kecil dapat mengajukan permohonan fasilitasi biaya Rp0 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021.
- g) *Witness* pelaksanaan surveilans Klien LSPro-HP yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan surveilans terhadap klien LSPro HP

BBP3KP di Kota Batam tanggal 2–4 September 2025. *Witness* dilakukan oleh Kepala BBP3KP, Bapak Dr. Rahmadi Sunoko, selaku Manajer Eksekutif LSPro HP BBP3KP. Melalui kegiatan *witness*, dilakukan penilaian terhadap kecakapan teknis, kepatuhan terhadap prosedur, dan konsistensi penerapan skema sertifikasi oleh evaluator LSPro HP.



Gambar 26. *Witness* pelaksanaan surveilan Klien LSPro-HP

- h) Sosialisasi skema sertifikasi produk bandeng tanpa duri beku dan udang beku tanggal 26 September 2025 di Ruang Arsip LSPro-HP BBP3KP dan melalui *zoom meeting*. Sesuai dengan PBSN Nomor 5 tahun 2024, lampiran LIX yang memuat produk bandeng cabut duri beku dan udang beku pada pada PBSN Nomor 1 tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Penyusunan skema mandiri dilakukan terhadap dua produk diatas oleh LSPro-HP BBP3KP sesuai PBSN Nomor 9 tahun 2023. Tim skema menyampaikan skema sertifikasi produk bandeng tanpa duri beku dan udang beku kepada personel LSPro-HP BBP3KP untuk memastikan bahwa seluruh personel memahami, mendukung, dan mampu melaksanakan proses sertifikasi sesuai skema yang berlaku dan termutakhir.
- n. Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan
 - 1) Pengujian yang dilaksanakan meliputi uji kimia, fisika, sensori, cemaran logam dan cemaran mikrobiologi.
 - 2) Pelatihan ISO 33403:2024: *Reference Materials – Requirements and recommendations for use* tanggal 31 Juli 2025 secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Laboratorium. BBP3KP bekerjasama dengan GQSP UNIDO menyelenggarakan pelatihan ini sehubungan dengan terbitnya

ISO 33403:2024 sebagai standar baru yang mengatur tentang persyaratan dan rekomendasi penggunaan bahan acuan bersertifikat.

Gambar 10. In House Training ISO 33403:2024

- 3) BBP3KP menerima kunjungan dari PT Garam dalam rangka koordinasi terkait penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025 dan metode pengujian garam yang dilakukan di Laboratorium BBP3KP tanggal 14 Agustus 2025. Saat kunjungan dilakukan praktek pengujian sulfat sebagai BaSO₄.
- 4) Uji banding untuk parameter uji *Enterococi*, *E.Coli* dan *Coliform* pada matriks air yang diselenggarakan BUSPM BBPMHKP. Uji banding antar laboratorium bertujuan untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengujian di berbagai laboratorium. BBP3KP melakukan pengujian atas beberapa sampel air yang disediakan dalam uji banding. Hasil penghitungan koloni *Enterococci*, *E. Coli*, dan *Coliform* dilaporkan dalam unit koloni per 100 mL (CFU/100 mL).



Gambar 27. Uji banding antar laboratorium dengan parameter bakteri *Enterococci* dan *Escherichia coli* dan *Coliform*

- 4) Ikut serta kegiatan uji banding parameter berat tuntas dan filth dari Laboratorium PPISHP DKI Jakarta. Uji banding antar laboratorium merupakan kegiatan penting untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil pengujian di laboratorium pengujian produk kelautan dan perikanan. Pengujian dilakukan secara serentak oleh para peserta uji banding termasuk tim dari BBP3KP tanggal 24 September 2025.
- o. Inkubasi Bisnis bagi UMKM Kelautan Perikanan
- 1) Rapat persiapan fasilitasi kemasan produk tenant Inbis Invapro KP tanggal 9 Juli 2025. Pertemuan ini membahas persiapan fasilitasi kemasan tenant inbis invapro KP terkait dengan jadwal, proses desain, alokasi anggaran, rencana produksi dan ukuran kemasan.

- 2) Bimbingan teknis manajemen keuangan bagi tenant Inbis Invapro KP tanggal 14 Juli 2025. Kegiatan terdiri dari 3 materi yaitu pelaporan keuangan sederhana, konsep dasar akuntansi dan pengenalan pajak umkm yang disampaikan oleh narasumber dari Tim Kerja Dukman bagian Keuangan.
- 3) Pertemuan dalam rangka percepatan Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal bagi PTN/PTS/PTKIN Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025. Kegiatan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Penilaian Kesesuaian, perwakilan dari Tim Kerja Lingkup BBP3KP serta narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- 4) Narasumber pada kegiatan pelatihan pengolahan makanan modern yang sehat dan bernilai ekonomis tinggi bagi siswa di Desa Miskin Ekstrim, SMAN 1 Praya Barat tanggal 18 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan sinergi antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB dan TP PKK Provinsi NTB, serta menjadi bagian dari program Desa Berdaya yang digagas oleh Gubernur NTB. Satker BBP3KP Mataram menyampaikan teknik dasar pengolahan mulai dari persiapan bahan, pengolahan adonan, hingga teknik pengemasan sederhana.



Gambar 28. Pengolahan Makanan Modern di Desa Miskin Ekstrim, SMAN 1 Praya Barat

- 5) *Focuss Group Discussion* (FGD) pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal BBP3KP tanggal 05 Agustus 2025 di Ruang Rapat Surimi BBP3KP. Kegiatan FGD dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan meliputi: Laporan Pelaksanaan oleh Kepala BBP3KP, *Keynote Speech* oleh Direktur Jenderal PDSPKP dan pemberian materi oleh narasumber yaitu Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Materi yang diberikan yaitu Ketentuan Regulasi dalam Persyaratan Pendirian dan Akreditasi LPH. Selanjutnya dilakukan diskusi terkait potensi sertifikasi halal di bidang

kelautan dan perikanan. BBP3KP berpeluang untuk menjadi LPH dengan lingkup kompetensi di bidang Makanan dan Minuman.



Gambar 29. Focuss Group Discussion (FGD) pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal BBP3KP

- 6) Rapat pembahasan mekanisme keuangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanggal 8 Agustus 2025. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal KKP, Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja Hukum Sekretariat Ditjen PDSPKP, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial BBP3KP. Hasil diskusi yaitu perlu diusulkan penambahan jenis dan tarif terkait layanan pemeriksaan halal untuk dimasukkan pada revisi PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini telah sampai pada tahap pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
- 7) Rapat pembahasan desain kemasan tenant Invapro Kape 2025 tanggal 13 Agustus 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan desain kemasan produk tenant sesuai dengan apa yang diinginkan. Materi Pelatihan disampaikan oleh tim Flexy Pack berupa *mockup* desain kemasan awal dari tenant inbis INVAPRO KP tahun 2025.
- 8) Penandatanganan Kerjasama Pembentukan Perwakilan LP3H dengan Pusat Studi Halal Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (PSH UNUSIA). Kegiatan dilaksanakan tanggal 11 September 2025 di Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (PSH UNUSIA). Kegiatan dihadiri oleh Kepala BBP3KP yang didampingi Ketua Tim Kerja beserta beberapa staf dari BBP3KP serta perwakilan dari Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (PSH UNUSIA). Tujuan dari pertemuan adalah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara

BBP3KP dengan Pusat Studi Halal Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (PSH UNUSIA) terkait dengan Pembentukan Perwakilan LP3H.



Gambar 30. Penandatanganan Kerjasama Pembentukan Perwakilan LP3H dengan PSH UNUSIA

- 9) Rapat Kaji Ulang Dokumen Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanggal 22 September 2025 secara *hybrid* di ruang rapat Batari BBP3KP melalui aplikasi *zoom meeting*. Rapat bertujuan untuk melakukan reviu atau kaji ulang terkait dengan dokumen Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan merumuskan masukan, saran, dan tindak lanjut untuk penyempurnaan dokumen LPH sebelum proses pengajuan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).



Gambar 31. Rapat Kaji Ulang Dokumen Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

- 10) Pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha di Satuan Kerja BBP3KP.
- Narasumber pada kegiatan diseminasi Pilus Ikan Layang bagi UMKM Bale Mpaq yang diselenggarakan oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus tanggal 9 Juli 2025.
 - Pelatihan pengolahan hasil perikanan (Siomay Ikan Nila dan Kerupuk Ikan Nila) yang merupakan bentuk sinergi antara Satker BBP3KP Mataram dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

- c) Pembinaan UMKM Bandeng Presto Desa Wohu – Bima. Materi yang diberikan mencakup legalitas usaha dan penerapan GMP dan SSOP.
 - d) Pelayanan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanggal 14 dan 16 Juli 2025.
 - e) Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada sistem Online Single Submission (OSS) untuk UMKM A7 (Aseven) tanggal 4 Agustus 2025 oleh Tim Satker BBP3KP Ambon. UMKM A7 dikenal memiliki ragam produk olahan berbasis ikan, dengan produk unggulan berupa Bakso Ikan Marlin.
 - f) Pendampingan penggunaan sarana produksi/ pengemasan (vacuum sealer) Poklhasar Mina Terampil tanggal 5 Agustus 2025. Jenis mesin vacuum sealer yang digunakan adalah jenis Powerpack DZ-260. Diharapkan dengan pemahaman yang diperoleh, dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran produk ikan asap cair Poklhasar Mina Terampil.
 - g) Pembinaan salah satu UMKM binaan Satker BBP3KP Palabuhanratu Poklhasar Dapur Ma'ls dalam Persiapan Penerimaan Bantuan Pemerintah berupa mesin pengaduk kerupuk dari Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP, serta alat pengiris kerupuk dan penggiling bumbu dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi tanggal 1-4 September 2025. Pembinaan yang dilaksanakan meliputi beberapa tahapan yaitu pembuatan E-Kusuka, penyusunan SK Poklhasar Dapur Ma'ls, penyusunan proposal permohonan bantuan pemerintah, dan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait proses penerbitan E-Kusuka.
- p. Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah.
- a) Monitoring pendampingan penerapan pengembangan produk kelautan dan perikanan tanggal 15 Juli 2025 dan 28 Agustus 2025 secara daring terhadap 24 UMKM.

- b) Pengembangan produk kelautan dan perikanan melalui pengolahan gelatin dari tulang hiu, kolagen dari kulit hiu dan albumin dari ekstrak daging hiu yang berasal dari PSPL Serang yang dikirimkan dari daerah Muara Baru.
- c) Kegiatan kerjasama teknologi pengolahan dan pemasaran dengan para akademisi, Dinas KP Provinsi Kabupaten/Kota, pelaku usaha perikanan dan stakeholder lainnya.
- d) Rapat koordinasi dan pembahasan data dashboard BBP3KP tanggal 17 Juli 2025. Rapat membahas tentang perubahan-perubahan yang diperlukan dalam penyusunan dashboard BBP3KP yang dibahas bersama tim dari data dan layanan Ditjen PDSPKP.
- e) Melaksanakan webinar seri III inovasi *Fish Chips* Tilapia: Penerapan dan Teknik Pengolahan bagi UMKM tanggal 29 Juli 2025. Agenda webinar terdiri dari materi penyampaian program peningkatan daya saing yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Depok, pengolahan *fish chips* tilapia yang disampaikan oleh narasumber UMKM Generasi Resti Ibu Kota Depok, demo praktek pengolahan *fish chips* tilapia di workshop BBP3KP dilanjutkan diskusi dan tanya jawab serta pemutaran video *Recook Fish Chips*.
- q. Diseminasi Masyarakat pada Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
 - a) Konten media sosial yang telah dipublikasikan akun BBP3KP selama periode triwulan III tercatat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) konten. Jumlah *story* yang dipublikasikan pada periode ini tercatat sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) *story*.
 - b) Pemutakhiran artikel/berita website BBP3KP sebanyak 30 (tiga puluh) judul pada Portal e-PPID BBP3KP.
 - c) Penyebarluasan informasi melalui Program Pemberdayaan Nelayan melalui Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan Kerjasama dengan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ditjen Perikanan Tangkap tanggal 19-20 Juli 2025 di PPN Kejawan

Cirebon. BBP3KP memberikan informasi terkait profil dan layanan publiknya serta materi tentang *branding* dan pemasaran untuk mempersiapkan pelaku usaha perikanan memasuki kompetisi pasar.

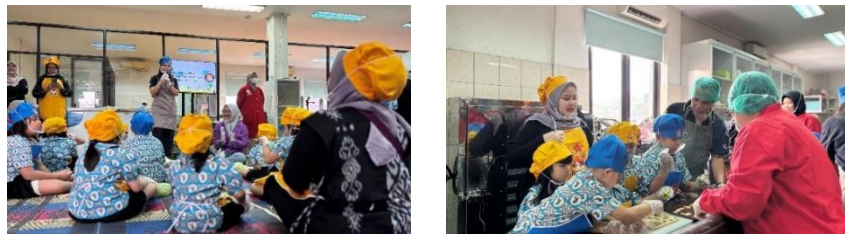
- d) Penyebarluasan informasi melalui Edukasi Manfaat Konsumsi Ikan dan Cara Pengolahannya pada KKN STKIP Arrahmaniyah tanggal 23 Juli 2025 di Kantor Desa Leuwikaret, Klanunggal, Kabupaten Bogor. BBP3KP memberikan edukasi tentang manfaat konsumsi ikan, praktek pengolahan naget dan kaki naga ikan, serta pengenalan berbagai macam produk olahan ikan hasil inovasi.
- e) Penyebarluasan informasi melalui BBP3KP Webinar Series 3: Inovasi *Fish Chips* Tilapia: Penerapan dan Teknik Pengolahan bagi UMKM tanggal 29 Juli 2025 melalui aplikasi *zoom meeting* dan *YouTube* BBP3KP.
- f) Penyebarluasan informasi melalui rapat pembahasan draft Perjanjian Kerjasama BBP3KP tanggal 6 Agustus 2025 di Ruang Rapat Nori BBP3KP. Rapat dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kemungkinan kerjasama dengan pihak ke-tiga dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) diantaranya PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Our Donuts, CV. Sakana Indo Prima, Laboratorium dan Perguruan Tinggi, dan Kementerian/ Lembaga/ Instansi Terkait.
- g) Audiensi Penawaran Program Kerjasama LPPOM MUI dengan BBP3KP tanggal 26 Agustus 2025 di Ruang Rapat Nori BBP3KP. Kerjasama dilaksanakan dengan ruang lingkup sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam payung hukum berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara lain terkait pendampingan sertifikasi halal, standarisasi dan legalitas usaha, business matching, pelatihan tentang keuangan, edukasi/diseminasi informasi, promosi produk, dan lain-lain.
- h) Kunjungan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Peringatan HUT ke 80 Republik Indonesia di BBP3KP. Kegiatan dirangkai dengan senam pagi bersama, launching pin Ditjen PDSPKP, penanaman pohon, dan kunjungan ke laboratorium. BBP3KP juga melaksanakan penyebarluasan informasi dengan menampilkan produk olahan hasil

kelautan dan perikanan dari tenant Invapro Kape, UMKM penerap inovasi dan klien LSPro-HP.



Gambar 32. Peringatan HUT ke 80 Republik Indonesia di BBP3K

- i) Penyebarluasan informasi melalui kegiatan pengenalan makanan sehat dengan menu ikan dan praktik mengolah ikan TK Indonesia Playschool Jakarta Timur. Kegiatan dilaksanakan tanggal 19 September 2025 di Workshop BBP3KP. Kegiatan bertujuan untuk mengenalkan siswa kanak-kanak terkait jenis dan manfaat makan ikan, belajar cara mengolah ikan secara sederhana berupa naget ikan, serta menumbuhkan rasa senang dan kebiasaan positif untuk makan makanan sehat. Kegiatan diikuti oleh 26 (dua puluh enam) siswa/i dan 5 (lima) guru pendamping TK Indonesia Playschool Jakarta Timur.



Gambar 73. Pengenalan makanan sehat dengan menu ikan dan praktik mengolah ikan TK Indonesia Playschool

- j) Audiensi peninjauan Kerja Sama BBP3KP dengan PT Pertamina Gas. Kegiatan dilaksanakan tanggal 23 September 2025 secara *hybrid* di Ruang Rapat Nori dan *daring* melalui aplikasi *zoom meeting*. Audiensi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Diseminasi, dihadiri perwakilan PT Pertamina Gas dan staf Tim Kerja Diseminasi. Audiensi dilaksanakan dengan memaparkan program dan kegiatan baik dari BBP3KP maupun PT Pertamina Gas serta peninjauan kemungkinan kerja sama.
- k) Penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblower system*. Selama periode III tahun 2025, BBP3KP menerima dan menjawab

sebanyak 32 (tiga puluh dua) pengaduan berupa pertanyaan masyarakat melalui email bbp3kp@kkp.go.id dan *direct message* media sosial (Instagram) pada periode triwulan III.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp103.302.576.000,- sampai dengan periode Triwulan III tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp 8.176.494.000,- atau setara dengan 11%.

D. Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas

Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas menunjukkan kenaikan kelas usaha berdasarkan 6 aspek usaha yang telah ditentukan sesuai dengan Kepdirjen Nomor 56 tahun 2024. Aspek usaha yang menjadi indikator terdiri dari aspek legalitas, sumberdaya manusia, produksi, keuangan, pemasaran dan operasional.

Usaha mikro dan usaha kecil bidang pengolahan produk KP yang meningkat skalanya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, peningkatan omset, peningkatan aset, peningkatan produksi, perluasan pasar, peningkatan tenaga kerja). Berdasarkan Kepdirjen PDSPKP No 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, penetapan kelas usaha dari pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diperoleh dari total pembobotan, dengan rincian:

- a. Kelas Mikro, merupakan kelas terbawah dengan batas nilai skoring 0 sampai dengan 50;
- b. Kelas Kecil, dengan batas nilai skoring 51 sampai dengan 70;
- c. Kelas Menengah, dengan batas nilai skoring 71 sampai dengan 100.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target Tahun 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)
Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas (%)	1,5	1	-	5	1,8	1,5	-	1,8	120	36	20	-

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas pada Triwulan III tahun 2025 mencapai 1,8%. Capaian tersebut setara dengan 120% terhadap target Triwulan III tahun 2025 sebesar 1,5%, dan 36% terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025, maka capaian triwulan III tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 36%. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2025 ditargetkan mencapai 5%. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas sebesar 1,8% dari 647 UMKM terkurasi atau sejumlah 12 UMKM. Meningkatnya kelas UMKM tersebut dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, operasional)

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Fasilitasi Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran. Dalam memfasilitasi Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran telah dilaksanakan kegiatan Rapat Verifikasi Kelengkapan Standar Usaha Pemasaran Ikan sebagai berikut :
 - 1) Rapat verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran selama periode Triwulan III 2025, telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana selama periode tersebut telah diterbitkan 23 Sertifikat Standar Pengolahan dan Pemasaran Ikan kepada 17 pelaku usaha yang bermohon dengan rincian 9 (sembilan) Sertifikat Standar Subsektor Pengolahan Ikan dan 14 (empat belas) Sertifikat Standar Subsektor Pemasaran Ikan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.
 - 2) Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha dalam mendukung kenaikan kelas usaha UMKM. Kegiatan pembinaan dan pendampingan berupa fasilitasi dan bimbingan teknis. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Webinar ekspor ke Malaysia secara daring tgl 11 September 2025, Webinar “Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Dan Profitabilitas Wirausaha Perikanan Berkelanjutan Series 1 (Digital Marketing Micro Business)” tanggal 16 September 2025, diselenggarakan oleh Ditjen PDSPKP dengan Asppendo, dan Webinar “Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Dan Profitabilitas Wirausaha Perikanan Berkelanjutan Series 2 (Company Profil)” 30 September 2025, diselenggarakan oleh Ditjen PDSPKP dengan Asppendo.
 - 3) Launching Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada tanggal 21 Juli 2025. Dalam rangka Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh

presiden secara hybrid, dilakukan pendampingan kepada masing-masing mock up di Wilayah IV yang telah ditentukan, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Launching akan diikuti oleh 83 ribu kades seluruh Indonesia, 80 ribu BPD, 514 bupati dan 38 gubernur.

- 4) Sosialisasi pembuatan proposal bisnis dan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Satgas Nasional dan Daerah serta HIMBARA pada tanggal 11 September 2025. Narasumber pada pertemuan ini adalah Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi – Kementerian Koperasi yang menjelaskan tata cara pembuatan akun dan pengisian profil koperasi (Pengurus, Gerai Usaha, Potensi desa, dan peta lokasi) dan perwakilan Danantara yang menjelaskan cara penyusunan proposal bisnis, berlaku sebagai moderator adalah Asisten Deputi Tata Niaga Pangan Dalam Negeri - Kemenko Pangan.
- 5) Rapat koordinasi penyusunan data base Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 September 2025 dengan tujuan memperkuat basis data dan penyusunan laporan terkait operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih khususnya sektor Kelautan dan Perikanan. Pembahasan dilakukan pada aspek pengembangan data dan tampilan laporan sektor kelautan, dan perikanan dan difokuskan pada penyusunan detail tema sektor Kelautan dan Perikanan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta unit usaha perikanan yang relevan. Hal ini diperlukan untuk menentukan peran KKP pada pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- 6) Musyawarah Desa Khusus dengan mengundang 239 Kopdeskel Merah Putih pada tanggal 24 September 2025 dalam rangka pemberian dukungan Kepala Desa terhadap pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sampai tanggal 25 September 2025 telah terbentuk badan hukum KDKMP sebanyak 81.625 unit. Target nasional untuk operasionalisasi KDKMP Tahap I sebesar 16.116 unit, khusus untuk Wilayah IV sebesar 5.412 unit

- 7) Fasilitasi Akses Pembiayaan kepada Penerima Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel 25 September 2025. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan program pembiayaan yang dapat diakses sesuai kebutuhan usaha perikanan berbasis gudang beku, memfasilitasi diskusi antara calon penerima pembiayaan, perbankan, dan pemerintah dan mendorong optimalisasi pemanfaatan GBP agar berdampak pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha. Hadir sebagai narasumber adalah Tim Kerja Sarana dan Prasarana Penyimpanan dan Distribusi Direktorat Sarana dan Prasarana dan Commercial & SME Business Group PT. BRI dan hadir sebagai peserta adalah perwakilan eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, 11 pelaku usaha penerima bantuan gudang beku dan Dinas KP sebagai pembinanya.



Gambar 33. Kegiatan Fasilitasi UMKM KP pada Akses Pembiayaan dan Literasi Keuangan

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas sebesar Rp7.619.000.000,- sampai dengan periode Triwulan III tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp679.175.000,- atau setara dengan 11%.

Sasaran Program 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP

E. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan, dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III TW III TW III 2024	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025 Tahun 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW I 2025	TW III 2025	TW II 2025			TW III 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan mencapai 86. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan

tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja implementasi reformasi birokrasi antara lain:

- a. Kegiatan Terkait Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP
 - 1) Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal pada tanggal 22 Agustus 2025 yang diikuti oleh Perwakilan unit Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP.
 - 2) Melaksanakan kegiatan pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal pada tanggal 11 September 2025.
- b. Kegiatan Terkait Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Ditjen PDPSKP
 - 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
 - 2) Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Juli sd September Tahun 2025 Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 13 - 15 Oktober 2025. *Output* kegiatan ini yaitu rekonsiliasi transaksi *to do list* dan pendetilan transaksi serta tutup periode pada aplikasi sakti dan monsakti;
 - 3) Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Kegiatan terkait Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDPSKP.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP.



d. Kegiatan Pembangunan Integritas Lingkup Ditjen PDSPKP

- 1) Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
- 2) Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan Juli, Agustus, dan September 2025 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
- 3) Pembentukan Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas Ditjen PDSPKP Tahun 2025;
- 4) Pemantauan Sistem Pembangunan Anti Korupsi Gratifikasi, Pengelolaan Pengaduan, dan MR KKN) lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 7 Agustus 2025;
- 5) Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Ditjen PDSPKP Semester I Tahun 2025 pada tanggal 12 Agustus 2025;
- 6) Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Peberdayaan Usaha pada tanggal 19 – 20 Agustus 2025;
- 7) Pemantauan Pembangunan Zona Integritas BBP3KP pada tanggal 25 – 26 Agustus 2025;
- 8) Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemasaran pada tanggal 27 – 28 Agustus 2025;
- 9) Pemantauan Implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 3 September 2025;

- 10) Sosialisasi Penanganan Konflik Kepentingan di lingkungan KKP pada tanggal 24 September 2025;
- 11) Pelaksanaan evaluasi capaian triwulan II Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 22 – 29 September 2025



Gambar 34. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Ditjen PDSPKP 2025

e. Kegiatan Terkait Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDPSKP

- 1) Rapat Penilaian Mandiri SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dilaksanakan tanggal 3-4 Juli 2025

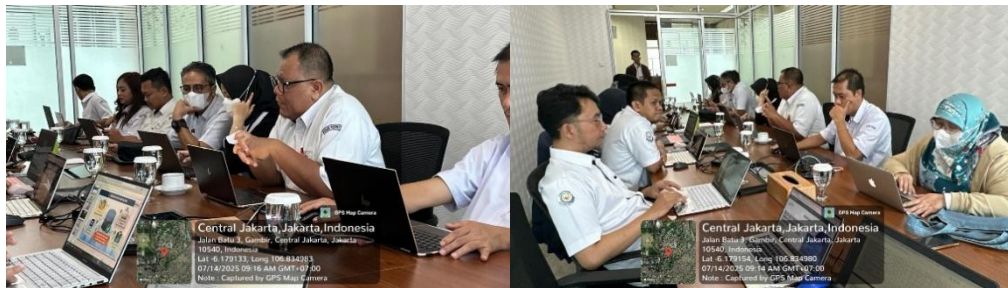


Gambar 35. Rapat Penilaian Mandiri SAKIP

- 2) Rapat Evaluasi atas rencana aksi Periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan tanggal 8 Juli 2025.
- 3) Rapat Penilaian Kinerja Triwulan II Anggaran 2025 pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) KKP, dilaksanakan tanggal 10 Juli 2025. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan KKP, perwakilan

Inspektorat Jenderal KKP dan Perwakilan Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan penilaian kinerja Triwulan II TA 2025 pada lingkup Ditjen PDSPKP.

- 4) Pembahasan finalisasi data dukung LKE SAKIP Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP dilaksanakan tanggal 14 Juli 2025 di hadiri oleh Inspektorat IV sebagai mitra Ditjen PDSPKP dan perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP.



Gambar 36. Pembahasan finalisasi data dukung LKE SAKIP Tahun 2025

- 5) Verifikasi Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Periode Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 22 Juli 2025.
- 6) Rapat Penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian IKU yang tidak mencapai target pada triwulan I tahun 2025 (IKU Ekspor) dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2025.

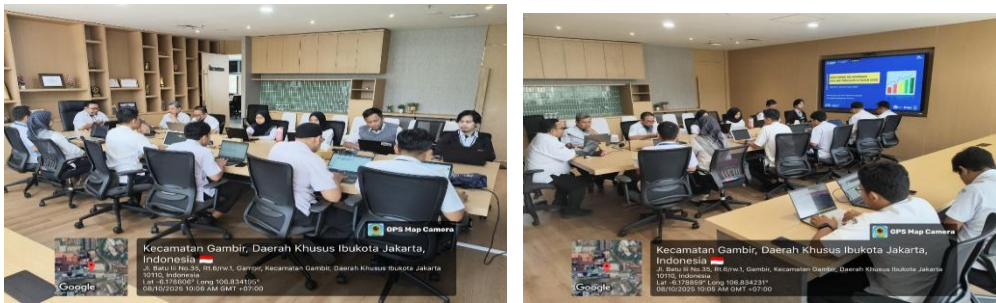


Gambar 37. Rapat Penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian IKU

- 7) Rapat Penyampaian Progres Pemenuhan Dokumen SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025 dan Hasil Uji Coba Pengembangan Fitur Aplikasi Kinerjaku dilaksanakan tanggal 16 September.

f. Kegiatan Terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDDSPKP

- a) Melaksanakan monitoring capaian IKPA terhadap progres pengisian Capaian Output periode Agustus 2025 dengan seluruh Unit Kerja dan Satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PDDSPKP pada tanggal 1 sd 10 setiap bulannya, kegiatan monitoring dilakukan secara daring dan diikuti oleh 34 Satker TP.
- b) Keikutsertaan dalam rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA Periode September Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, KKP pada tanggal 6 Oktober 2025.



Gambar 38. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode September Tahun 2025

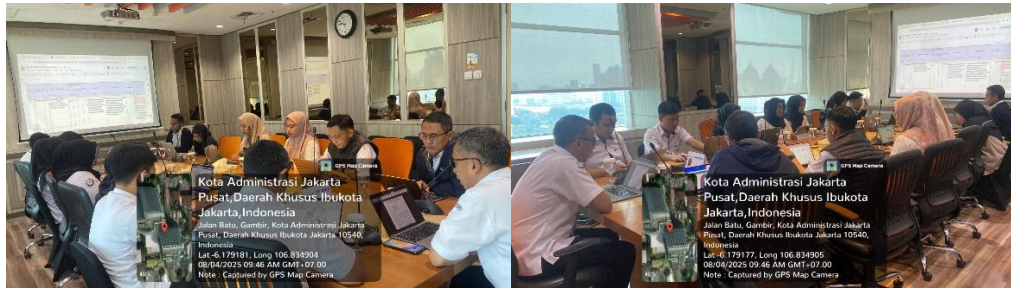
g. Kegiatan Terkait Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDDSPKP

- 1) Rapat pembahasan Bahan Strategic Planning Ditjen PDDSPKP Tahun 2025-2029, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025
- 2) Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025



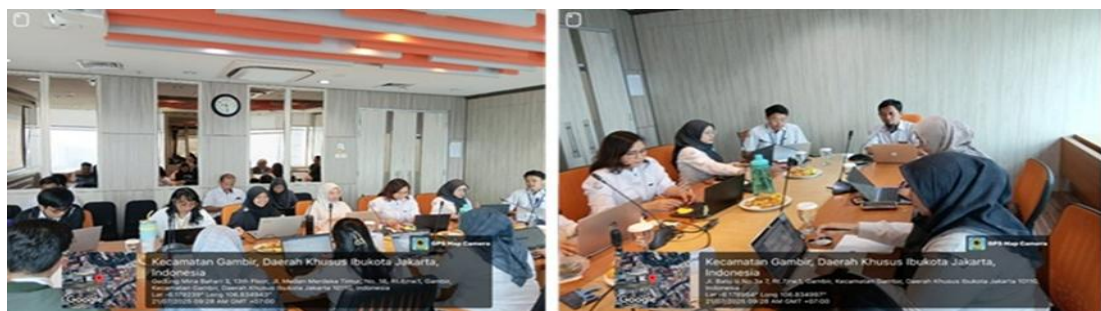
Gambar 39. Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026

- 3) Rapat pembahasan Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 2025. Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Agustus 2025 yang dipimpin oleh Tim Auditor, Inspektorat IV, Itjen KKP serta dihadiri oleh Koordinator Program unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan perwakilan tim kerja lingkup Setditjen PDSPKP yang telah menyusun rencana kerja anggaran tahun 2026
 - 4) Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025. Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program serta dihadiri oleh Koordinator Program unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan perwakilan tim kerja lingkup Setditjen PDSPKP. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan pada 29 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak 5 Agustus 2025
 - 5) Rapat Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Ditjen PDSPKP Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025. Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas Penyesuaian RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2025.
- h. Kegiatan Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Ditjen PDSPKP
- 1) Melaksanakan kegiatan pembahasan laporan SPIP bulan Agustus 2025 dan penginputan data pelaksanaan SPIP melalui aplikasi SILASTI pada tanggal 9 September 2025.
 - 2) Melaksanakan kegiatan persiapan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi pada tanggal 4 Agustus 2025.



Gambar 40. Kegiatan Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

- i. Kegiatan terkait Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDDSPKP
 - 1) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pengawas dan Administrator , 17 Juli 2025;
 - 2) Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan II Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025;
 - 3) Pendampingan pendataan, evaluasi dan pengusulan Calon PPPK Paruh Waktu tanggal 14 s.d. 15 Agustus 2025;
 - 4) Validasi dan Penginputan Nomor Induk (NI) Data Calon PPPK lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 25 s.d 28 Agustus 2025
 - 5) Pembahasan hasil klarifikasi kompetensi teknis penilaian kompetensi jabatan fungsional bidang PDDSPKP tanggal 3 s.d. 4 September 2025



Gambar 41. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai

j. Kegiatan terkait Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen PDSPKP

- 1) Telah dilaksanakan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman pada tanggal 2 September 2025



Gambar 42. Konsultasi Publik Rancangan Permen KP tentang Indikasi Geografis Hasil KP

- 2) Telah dilakukan beberapa kali rapat penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan, dan direncanakan akan dilakukan konsultasi publik pada bulan Oktober.
- 3) Melakukan penyusunan peraturan presiden yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Pada Triwulan III telah dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yaitu pada tanggal 18 September 2025. Selanjutnya Sekretaris Jenderal KKP telah mengirimkan Surat Nomor B.727/MEN-SJ/HK.150/IX/2025 tanggal 29 September 2025 kepada Menteri Hukum hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.

k. Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

- 1) Pelatihan Pelatihan Digitalisasi Dokumen pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat Investasi GMB III Lantai 15.
- 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025



Gambar 43. Sosialisasi Permen KP No. 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP

- 3) Kegiatan Penataan Arsip pada tanggal 30 September 2025 sampai dengan 2 Oktober 2025 di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat

l. Kegiatan Terkait Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Ditjen PDSPKP

- 1) Pelaksanaan rapat monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka pemutakhiran Rencana Umum Pengadaan (RUP) Semester 1 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025.
- 2) Pelaksanaan rapat audiensi calon penyedia sarana sistem rantai dingin pada kegiatan kampung nelayan merah putih tahap I tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan mengundang para calon penyedia sarana sistem rantai dingin yaitu kendaraan berpendingin, gudang beku portabel, pabrik es portabel (*slurry ice* dan balok) dan *Cool Box*. Rapat diselenggarakan sepanjang bulan Juli sampai dengan Agustus 2025.

m. Kegiatan terkait Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDPSKP

- 1) Rapat Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada tanggal 1 Juli 2025;
- 2) Rapat Koordinasi Pemenuhan Bukti Dukung PEKPPP Mandiri Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 23 Juli 2025;
- 3) Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP bersama Inspektorat IV pada tanggal 28 Juli-1 Agustus 2025;
- 4) Rapat Koordinasi PEKPPP Mandiri Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 September 2025;
- 5) Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Ditjen PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 23 September 2025; dan
- 6) Pembahasan Hasil Validasi Data SKM Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 25 September 2025.

n. Kegiatan Terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Ditjen PDSPKP

Pelayanan bantuan hukum yang ditangani oleh Ditjen PDSPKP pada Triwulan III berupa pendampingan Tim Teknis Ditjen PDSPKP dalam memenuhi undangan wawancara dan permintaan dokumen oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, di antaranya:

- 1) Pendampingan Tim Teknis Ditjen PDSPKP dalam memenuhi undangan wawancara dan permintaan dokumen oleh Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pabrik Tepung Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2016
- 2) Pendampingan Hukum terkait adanya perkara dugaan terjadinya tindakan pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, Pada tanggal 20 Agustus 2025 memberikan pendampingan hukum kepada pegawai/pejabat atas dasar surat S.Pgl/S-5/6415/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 5 Agustus 2025 hal pemanggilan sebagai saksi perkara dugaan terjadinya tindakan

pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang terjadi di Pasar Ikan Higienis (Everfresh Market) Jalan Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- 3) Pendampingan pemenuhan dokumen dan penunjukan ahli pada permintaan Kejaksaan Rote Ndao
- o. Kegiatan Terkait Kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti Oleh Ditjen PDSPKP

- 1) Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Ditjen PDSPKP;
 - a) Melaksanakan Rapat Pembahasan Kertas Posisi DELRI Sidang COFI – Fish Trade tanggal 1 September 2025;
 - b) Menghadiri Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan Pemerintah Kamboja tanggal 2 September 2025;
 - c) Menghadiri Webinar IPNLF "advocating for SSF market access at the 2025 FAO fish trade meeting" tanggal 2 September 2025;
 - d) Menghadiri Pembahasan Counterdraft MOU KKP – Rusia tanggal 3 September 2025;
 - e) Melaksanakan Rapat Pembahasan FAO Guideline of Ecolabelling dengan IPNLF tanggal 4 september 2025;
 - f) Rapat Pembentukan COAST Joint Committee tanggal 4 September 2025;
 - g) Penjajakan rencana kerja sama BBP3KP dan LPPOM MUI tanggal 8 September 2025;
 - h) Menghadiri pertemuan the 20 th Session of the COFI Sub Committee on Fish Trade (SC-FT) tanggal 8-12 September 2025
 - i) Menghadiri Rapat Pembahasan *Concern* Indonesia dan Penyampaian Posisi Rusia terkait Draf MoU Perikanan dan Budidaya RI-Rusia tanggal 11 September 2025
 - j) Mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi akhir Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFPF) tanggal 15-18 September 2025

- k) Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bilateral Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 17 September 2025;
 - l) Menghadiri Pembahasan Counterdraft MoU KKP-ACIAR tanggal 18 September 2025;
 - m) Rapat Pembahasan Concept Note Green Climate Fund tanggal 18 September 2025;
 - n) Rapat Pembahasan COAST Facility tanggal 18 September 2025;
 - o) Rapat Penyusunan Posisi Indonesia pada Pembahasan Draft Mol Perikanan dan Budidaya RI-Rusia tanggal 19 September 2025;
 - p) Pembahasan Counterdraft Plan of Action dan TOR Indonesia – Tanzania Joint Technical Committee RI-Tanzania tanggal 22 September 2025;
 - q) Pembahasan Permohonan Pertemuan Permanent Secretary Ministry of Marine and Blue Economy Federal Nigeria dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tanggal 22 September 2025;
 - r) Pembahasan dan Penandatanganan Kerja sama Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) RARE Tahun Anggaran 2025-2026 tanggal 23 September 2025;
 - s) Penyusunan posisi DELRI untuk 5th Plenary WG TSD ACAFTA tanggal 23 September 2025;
 - t) Diseminasi Penyelenggaraan COP 30 dan persiapan DELRI tanggal 24 September 2025;
 - u) Pertemuan Regional Development through Indonesia's Seafood Processing Supply Chain tanggal 25 September 2025;
 - v) Regional Consultation Workshop on the Study of the Small-Scale Fisheries Supply Chain in Southeast Asia tanggal 24-26 September 2025
- 2) Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Ditjen PDSPKP;
- a) Melaksanakan Rapat Pembahasan Amandemen PKS antara Ditjen PDSPKP KKP dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum tanggal 3 September 2025;

- b) Menghadiri Rapat Pembahasan Pembaruan Kesepakatan Bersama antara KKP dengan UGM tanggal 4 September 2025;
 - c) Melaksanakan rapat pembahasan PKS antara Ditjen PDSPKP dengan BPOM tanggal 10 September 2025
 - d) Menghadiri Rapat penyampaian hasil riset quick assesment UPI oleh DFW tanggal 10 September 2025;
 - e) Menghadiri Rapat Audiensi PT. Gastiasih Caraka tanggal 11 september 2025;
 - f) Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pemasarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Ditjen Penguatan daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 19 September 2025;
 - g) Rapat Pemantauan Implementasi Kesepakatan Bersama antara KKP dan Yayasan MDPI tanggal 22 Septemberf 2025;
 - h) Diskusi Peluang Kolaborasi dan Dukungan WRI Indonesia untuk Implementasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2025;
 - i) Melaksanakan audiensi dengan KPKP PTMA Aisyiah tanggal 24 September 2025
- p. Kegiatan terkait Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Bidang PDSPKP
- 1) Penyebaran Narasi Positif secara Masif di Media Sosial Melalui kanal resmi media sosial Ditjen PDSPKP (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Youtube), dilakukan publikasi rutin untuk memperkuat citra positif sektor kelautan dan perikanan khususnya bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Konten yang diunggah menyoroti keberhasilan program dan kegiatan, kegiatan lapangan, data data capaian kinerja dan infromasi seputar penguatan daya saimg produk kelautan dan perikanan.

- 2) **Pembuatan dan Penyebaran Siaran Pers**
Ditjen PDSPKP secara rutin menyusun dan menyebarluaskan siaran pers resmi sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi kepada publik. Siaran pers ini berfokus pada upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta menjadi media klarifikasi terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat maupun di kalangan mitra internasional
- 3) **Penempatan Pemberitaan (Media Placement)**
Melakukan kerja sama dengan media massa nasional dan daerah untuk menempatkan pemberitaan positif mengenai program, capaian, dan keberhasilan Ditjen PDSPKP. Strategi ini dilakukan agar informasi dapat menjangkau masyarakat luas dan membangun persepsi publik yang konstruktif terhadap sektor kelautan dan perikanan.
- 4) **Pembuatan dan Penayangan Materi Video**
Mengembangkan berbagai materi video informatif dan inspiratif yang menampilkan potensi produk, pelaku usaha, serta inovasi di bidang kelautan dan perikanan. Konten tersebut disebarluaskan melalui media sosial, kanal YouTube Ditjen PDSPKP, serta platform Neptune TV yang tayang di Biznet IPTV, IndiHome TV, Vidio, dan YouTube.
- 5) **Pelaksanaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**
Menyelenggarakan layanan informasi publik yang cepat dan responsif guna memberikan klarifikasi, tanggapan, dan pelayanan atas permohonan informasi dari masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, pada tahun 2024 Ditjen PDSPKP telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan berhasil meraih kategori “Informatif”, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik.
- 6) **Pendokumentasian Kegiatan Sebagai Bahan Publikasi dan Konten Digital**
Melaksanakan dokumentasi seluruh kegiatan Ditjen PDSPKP baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjadi bahan pembuatan konten

publikasi digital. Dokumentasi ini mendukung keberlanjutan produksi konten positif dan menjadi arsip komunikasi publik yang memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi lembaga

q. Kegiatan Terkait Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP

- 1) Telah dilaksanakan kegiatan Persiapan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2027 Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 3 - 4 September 2025. *Output* kegiatan ini yaitu membuat usulan RKBMN 2027 berpedoman pada ketentuan terbaru, memperhatikan hasil pemeriksaan BPK, serta disesuaikan dengan struktur organisasi setelah delayering;
- 2) Pada tanggal 21 Juli 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan surat dinas ke KPKNL Jakarta II dengan nomor B.6463/DJPDSPKP.1/PL.750/VII/2025 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan BMN satker Sekretariat Ditjen PDSPKP unit Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pemasaran berupa 2 (dua) unit peralatan mesin (mesin pembuat es (IFM) dan cold storage (Ice storage)) dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan Rp. 4.059.427.500,00;
- 3) Pada tanggal 29 Juli 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan surat dinas ke KPKNL Jakarta II dengan nomor B.6670/DJPDSPKP.1/PL.750/VII/2025 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan BMN satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan berupa 10 (sepuluh) unit peralatan mesin dengan nilai perolehan diatas 100 juta dengan nilai keseluruhan Rp. 4.203.632.813,00;
- 4) Pada tanggal 30 Juli 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Biro Keuangan dan BMN dengan nomor 2830/DJPDSPKP.1/PL.750/VII/2025 perihal Permohonan Surat Persetujuan Penghapusan atas usulan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa 3 (tiga) unit Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai perolehan keseluruhan Rp. 178.862.000,00;
- 5) Pada tanggal 4 Agustus 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Inspektorat Jenderal IV dengan nomor

- 2905/DJPDSPKP.1/PL.750/VIII/2025 perihal Permohonan Reviu Usulan Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN berupa 3 (tiga) paket barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam proses dengan nilai perolehan keseluruhan Rp. 223.911.800,00;
- 6) Pada tanggal 14 Agustus 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Biro Keuangan dan BMN dengan nomor 3048/DJPDSPKP.1/PL.750/VIII/2025 perihal Permohonan Penetapan Penghapusan BMN yang dikelola Dirjen PDSPKP pada Sekretariat Ditjen PDSPKP satker Pembantu Direktorat Logistik atas dasar Persetujuan BMN karena sebab-sebab lain yang telah diterbitkan oleh KPKNL Jakarta II dengan nomor S-693/MK/KNL.0702/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
 - 7) Pada tanggal 20 Agustus 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Biro Keuangan dan BMN dengan nomor 3113/DJPDSPKP.1/PL.750/VIII/2025 perihal Permohonan Surat Persetujuan Penghapusan atas usulan Penghapusan Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam Proses berupa 3 (tiga) paket barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam proses dengan nilai perolehan keseluruhan Rp. 223.911.800,00;
 - 8) Pada tanggal 28 Agustus 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Persetujuan Penghapusan dengan nomor 7915/DJPDSPKP.1/PL.750/VIII/2025 perihal Persetujuan Penghapusan BMN karena Sebab Lain pada Direktorat Pemasaran berupa 3 (tiga) paket barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam proses dengan nilai perolehan keseluruhan Rp. 223.911.800,00;
 - 9) Pada tanggal 2 September 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Biro Keuangan dan BMN dengan nomor 3285/DJPDSPKP.1/PL.750/IX/2025 perihal Permohonan Penetapan Penghapusan BMN yang dikelola Dirjen PDSPKP pada Sekretariat

Ditjen PDSPKP satker Pembantu Direktorat Pemasaran atas dasar Persetujuan Penghapusan BMN karena sebab lain yang telah diterbitkan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dengan nomor B.7915/DJPDSPKP.1/PL.750/IX/2025 tanggal 28 Agustus 2025;

- 10) Pada tanggal 13 Oktober 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Direktorat Pemasaran dengan nomor 3901/DJPDSPKP.1/PL.750/X/2025 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan BMN

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja implementasi birokrasi sebesar Rp 75.790.249.000,- sampai dengan periode Triwulan III tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp50.661.103.043,- atau setara dengan 67%.

3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp255.259.620.000,- (*Dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNBPN. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp96.829.956.000,- (*Sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp158.429.664.000,- (*Seratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*) Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan periode triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp84.206.356.000,- (*Delapan puluh empat miliar dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) atau setara dengan 32,99% terhadap total pagu anggaran awal atau 52,15% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

Tabel 7. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2024 (Dalam Rp.000)

Satker	Pagu Awal	AA/Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	% Realisasi Thd Pagu Awal	% Realisasi Thd Pagu Efektif
Pusat	205.266.750	86.789.603	118.477.147	64.840.511	19,40	51,14
UPT	45.204.063	5.251.546	39.952.517	19.365.845	42,84	48,47
Tugas Pembantuan	4.788.807	4.788.807	-	-	-	-
Jumlah	255.259.620	96.829.956	158.429.664	84.206.356	32,99	53,15

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu per September 2025

Tabel 8. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024 (Dalam Rp.000)

Satker	Pagu Awal	AA/Blokir	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Thd Pagu Awal	% Realisasi Thd Pagu Setelah AA
Dit. Pemasaran	81.669.027	40.306.237	41.362.790	7.811.224	9,56	18,88
Dit. Pengolahan	15.528.807	11.705.464	3.823.343	932.923	6,01	24,40
Sekretariat Ditjen PDSPKP	89.592.966	19.057.041	70.535.925	54.366.487	60,68	77,08
Dit. Logistik	5.856.950	4.924.608	932.342	771.238	13,17	82,72
Dit. Pemberdayaan Usaha	12.619.000	10.796.253	1.822.747	958.639	7,60	52,59
BBP3KP	45.204.063	5.251.546	39.952.517	19.365.845	42,84	48,47
Tugas Pembantuan	4.788.807	4.788.807	0	0	0,00	0,00
Jumlah	255.259.620	96.829.956	158.429.664	84.206.356	32,99	53,15

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu per September 2025

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada Triwulan III tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 94,23 (Kategori Baik)

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP periode Triwulan III tahun 2025, terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Rumput Laut. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 9. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Rumput Laut	Penurunan nilai ekspor rumput laut yang disebabkan penurunan permintaan industri yang menggunakan produk rumput laut di negara Tiongkok yang merupakan tujuan utama ekspor rumput laut Indonesia, serta adanya perlambatan ekonomi global yang mengakibatkan	<ul style="list-style-type: none">upaya promosi/sosialisasi terkait biodiversitas dan potensi rumput laut di Indonesia dalam rangka memperluas basis pemanfaatan dan pasar rumput laut.

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	penurunan aktivitas industri hilir di luar negeri	

3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada Triwulan III tahun 2025 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025 antara lain :

Tabel 10. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2025	Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2025
1	Nilai Ekspor Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> upaya promosi/sosialisasi terkait potensi produk turunan rumput laut, seperti <i>biostimulant</i> dan produk non-konsumsi, dalam rangka memperluas basis pemanfaatan dan pasar rumput laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Webinar Biostimulan dan Pupuk Hayati Rumput Laut pada tanggal 11 September 2025 menyoroti potensi besar biostimulan berbasis rumput laut yang mengandung senyawa bioaktif seperti alginat, auxin, dan sitokinin, sekaligus mengidentifikasi tantangan utama berupa perizinan, standarisasi, dan ketersediaan bahan baku berkualitas. Koordinasi dengan Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) pada tanggal 25 September 2025 yang membahas kondisi pasar global, tantangan industri, dan peluang pengembangan produk bernilai tambah. Astruli menyampaikan bahwa harga bahan baku telah kembali ke tingkat pra-pandemi,

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2025	Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2025
			<p>namun daya saing harga karagenan Indonesia masih lemah akibat rasio kapasitas olahan yang jauh di bawah Tiongkok (1:4) dan dominasi perusahaan PMA dalam penyerapan bahan baku domestik (rasio kapasitas 30:1 terhadap PMDN). Selain itu, tantangan eksternal meliputi kenaikan biaya logistik, dampak perubahan iklim, dan ketatnya persyaratan teknis ekspor di negara tujuan (Jepang, Uni Eropa, dan India) juga telah menekan ekspor rumput laut Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Optimasi sarana pasca panen rumput laut melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana pasca panen rumput laut di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 21 Agustus 2025. Sarana pasca panen rumput laut telah dimanfaatkan secara penuh oleh Yayasan Vokasi Nusa Tenggara. Pada tahun 2024 tercatat nilai penjualannya mencapai Rp. 800 juta. Saat ini harga rumput laut basah di pembudidaya adalah Rp. 3.000,-/kg. ● Pemantauan stok rumput laut melalui sistem resi gudang (SRG). Realisasi penerbitan resi gudang rumput laut pada Triwulan III (s.d 30 September 2025) tercatat 2 resi gudang rumput laut yang diterbitkan oleh PT Wahana Pro

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2025	Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2025
			<p>Natural di Makassar dengan volume sebesar 400 ton, dan belum mendapatkan pembiayaan. Realisasi ini menurun dibanding periode yang sama Tahun 2024 yaitu sebanyak 58 resi gudang senilai Rp 46 Miliar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kapasitas lembaga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Rumput Laut

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tornanda Syaifullah**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tornanda Syaifullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (Miliar USD)	0,57
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (Miliar USD)	5,68
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (Persen)	5
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PDSPKP	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
<i>PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</i>		
1	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	85.045.027.000
2	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	15.528.807.000
3	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	12.619.000.000
4	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	5.856.950.000
5	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.400.742.000
<i>PROGRAM : Dukungan Manajemen</i>		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PDSPKP	127.809.094.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		255.259.620.000

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tornanda Syaifullah